

■ **MEMPERKUAT  
MASYARAKAT SIPIL  
SECARA GLOBAL**



**INDEKS  
KEBERLANJUTAN  
ORGANISASI  
MASYARAKAT SIPIL  
INDONESIA 2021**

■ **VERSI BAHASA INDONESIA**  
DITERBITKAN OLEH KONSIL LSM INDONESIA



# **INDEKS KEBERLANJUTAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL INDONESIA 2021**

**Dikembangkan oleh:**

United States Agency for International Development  
Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance  
Center of Excellence on Democracy, Human Rights and Governance

Publikasi penelitian ini dimungkinkan atas dukungan yang diberikan oleh United States Agency for International Development (USAID) di bawah Perjanjian Kerja Sama No. AID-OAA-LA-17-00003.

**Disclaimer:** Opini yang tertuang dalam laporan ini adalah opini panelis dan para peneliti serta tidak mencerminkan pandangan USAID atau FHI 360.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Publikasi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa kontribusi dari para individu dan organisasi. Kami sangat berterima kasih kepada mitra pelaksana kami, yang berperan penting dalam memfasilitasi pertemuan panel ahli dan menuliskan laporan tiap negara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para perwakilan OMS dan ahli, mitra USAID, dan donor internasional yang berpartisipasi sebagai panel ahli di setiap negara. Pengetahuan, persepsi, ide, pengamatan, dan kontribusi mereka merupakan fondasi yang mendasari penyusunan Indeks ini.

## MITRA LOKAL

### KONSIL LSM INDONESIA

Frans Toegimin  
Lusi Herlina  
Anick HT  
Sarwitri

## MANAJER PROYEK

### FHI 360

Michael Kott  
Eka Imerlishvili  
Alex Nejadian  
William Daley

### INTERNATIONAL CENTER FOR NOT-FOR-PROFIT LAW (ICNL)

Kate Musgrave  
Jennifer Stuart

## KOMITE REDAKSI

Gary Bland (USAID), Michael Chelius (USAID), Maria Covalenco-Tietz (USAID),  
John Tyynela (FHI360), Bishnu Sapkota (FHI360), Hans Antlov (FHI360),  
Natasha Dandavati (ICNL), Zac Lampell (ICNL),  
dan Kourtney Pompei (Ahli Wilayah)

# **TIM RISET INDONESIA**

## **TIM RISET UTAMA:**

Frans Toegimin  
Lusi Herlina  
Anick HT

## **DESK RISET:**

Sarwitri

## **SURVEI ONLINE:**

Fahd Riyadi

## **PANEL AHLI:**

Yuli Rustinawati, Rubiyanti Kholifah, Maria Anik Tunjung Wusari, Sulistriani,  
Mickael Bobby Hoelman, Feri Amsari, M. Yusran Laitupa, Wahyu Dhyatmiko,  
Jonna Aman Damanik, Handoko, dan Misbakhul Hasan



# INDONESIA

Ibu kota: Jakarta

Populasi: 277.329.163

PDB per kapita (PPP): \$11.400

Indeks Pembangunan Manusia: Tinggi (0,705)

Indeks Kebebasan di Dunia: Semi Bebas (59/100)



# PENGANTAR EDISI BAHASA INDONESIA

## ■ Latar Belakang

The Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI) atau Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil merupakan laporan yang mengukur perkembangan keberlanjutan OMS dengan menggunakan 7 dimensi dan 38 sub dimensi. Ketujuh dimensi tersebut adalah lingkungan hukum, kapasitas organisasi, kemampuan finansial, advokasi, penyediaan layanan, infrastruktur sektoral, dan citra publik. Laporan CSOSI disusun setiap tahun. Indeks ini dimaksudkan untuk menjadi sumber informasi yang berguna bagi OMS, pemerintah, lembaga donor, akademisi, dan lainnya yang ingin lebih memahami dan memantau aspek kunci keberlanjutan OMS.

Konsil LSM Indonesia sudah terlibat menyiapkan CSOSI sejak tahun 2014, setidaknya CSOSI 2021 merupakan laporan kedelapan yang disiapkan oleh Konsil LSM Indonesia.

CSOSI tidak hanya dilakukan di Indonesia saja tapi di seluruh dunia, pada CSOSI 2021 ada 73 negara yang terlibat. Untuk tingkat Asia, ada 8 negara yang terlibat, yaitu: Nepal, Bangladesh, Thailand, Filipina, Cambodia, Sri Langka, Timor Leste, dan Indonesia.

Proses penilaian ini melibatkan panel ahli yang secara khusus diundang untuk melihat perkembangan masing-masing dimensi secara detail, dan membandingkan dengan indeks tahun sebelumnya. Panel ahli ini menyepakati skor untuk setiap dimensi, yang berkisar dari 1 (tingkat keberlanjutan yang paling tinggi) hingga 7 (yang paling rendah).

## ■ Proses Penyusunan

Proses penyusunan indeks ini dilalui dalam empat tahapan, yakni:

### 1. Desk Riset

Riset awal ini adalah proses mengidentifikasi seluruh kasus-kasus yang melibatkan OMS di Indonesia berdasarkan keseluruhan indikator dalam tujuh dimensi yang telah ditentukan selama tahun 2021. Identifikasi ini dilakukan melalui penelusuran berita online, laporan berbasis website OMS, hasil penelitian, dokumen kebijakan, maupun wawancara langsung dengan OMS jika kasus tertentu dianggap membutuhkan konfirmasi lebih lanjut.

Hasil desk riset ini digunakan sebagai informasi dasar yang didistribusikan dan atau dipresentasikan kepada tim panel ahli sebelum melakukan penilaian.

### 2. Survei Online

Survei Online ini dirumuskan berdasarkan indikator yang juga merujuk langsung kepada poin-poin dalam keseluruhan tujuh dimensi penilaian, yang dikembangkan bersama dengan FHI360. Survei ini kemudian berhasil mendapatkan respons dari 72 responden dari 21 provinsi di Indonesia, meskipun form survei telah disebarkan kepada ribuan lembaga.

Hasil survei online ini digunakan sebagai data pendamping (sekunder) dari proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Ahli.

### 3. Pertemuan Panel Ahli

Penilaian dari Panel Ahli inilah yang digunakan sebagai rujukan utama Indeks Keberlanjutan OMS. Panel Ahli dipilih dari berbagai representasi bidang dan disiplin dan kecenderungan. Keragaman representasi memungkinkan saling konfirmasi antar Panel Ahli sehingga turut memperkuat objektivitas penilaian.

Panel ahli untuk CSOSI Indonesia 2021 kali ini terdiri dari 11 ahli, 4 di antaranya perempuan, dan 7 laki-laki. Mereka adalah:

- Yuli Rustinawati, Direktur Arus Pelangi, yang merepresentasikan OMS yang bergerak dalam isu LGBTQ di Jakarta.
- Rubiyanti Kholifah, Country Representative AMAN (The Asian Muslim Network Indonesia) Indonesia.
- Maria Anik Tunjung Wusari, Ketua jaringan nasional Lokadaya, Yayasan Penabulu.
- Sulistriani, Ketua DPP FSB KAMIPARHO KSBSI, yang merepresentasikan lembaga serikat buruh nasional.
- Mickael Bobby Hoelman, Pengurus Senior INFID, yang merepresentasikan jaringan OMS Nasional.
- Feri Amsari, Dosen Hukum dari Universitas Andalas, yang merepresentasikan akademisi.
- M. Yusran Laitupa, Direktur Eksekutif Yayasan Bhakti Makassar, yang merepresentasikan jaringan OMS di Indonesia Timur
- Wahyu Dhyatmiko, Pemimpin Redaksi TEMPO, yang merepresentasikan media nasional.
- Jonna Aman Damanik, anggota Komisi Nasional Disabilitas

- Handoko, Konsultan Senior REMDEC SWA PRAKARSA, yang merepresentasikan pengamat OMS nasional
- Misbakhul Hasan, Sekretaris Jendral SEKNAS FITRA, yang merepresentasikan jaringan OMS nasional

#### 4. Penulisan laporan

Penulisan laporan menggunakan format yang telah disepakati oleh Tim Kurasi Internasional dan melalui pengeditan dan konfirmasi berjenjang antara Tim Peneliti Indonesia dengan Tim Kurator FHI360 secara ketat dan simultan. Laporan tiap negara ini kemudian digabungkan menjadi laporan regional (Asia) dan laporan global.

## ■ **Tujuh Dimensi Penilaian**

7 Dimensi Penilaian dalam CSOSI 2021 ini adalah:

### 1. LINGKUNGAN HUKUM

Dimensi ini terdiri dari 6 sub-dimensi yaitu:

- 1) Pendaftaran - Prosedur hukum untuk meresmikan keberadaan OMS
- 2) Operasi - Penegakan hukum dan manfaatnya terhadap OMS
- 3) Pelanggaran Negara - Penyalahgunaan yang dilakukan terhadap OMS dan anggotanya oleh institusi negara
- 4) Perpajakan - Kebijakan pajak yang mempengaruhi OMS
- 5) Akses terhadap Sumber Daya
- 6) Kapasitas Hukum Lokal - Ketersediaan dan kualitas keahlian hukum untuk OMS

### 1. KAPASITAS ORGANISASI:

Dimensi ini terdiri dari 5 sub-dimensi, yaitu:

- 1) Pembangunan Konstituensi
- 2) Perencanaan Strategis
- 3) Struktur Pengelolaan Internal
- 4) Pengelolaan Staf OMS - Kualitas dan Manajemen Sumber Daya Manusia
- 5) Akses Pada Teknologi

### 2. KEMAMPUAN FINANSIAL:

Dimensi ini terdiri dari 6 sub-dimensi yaitu:

- 1) Diversifikasi - Akses ke berbagai sumber pendanaan
- 2) Dukungan Lokal - Sumber pendanaan dan sumber domestic
- 3) Dukungan Luar Negeri - Sumber pendanaan dan sumber luar negeri
- 4) Fundraising - Kapasitas OMS untuk mengumpulkan dana
- 5) Penghasilan Yang Dibayar - Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk dan layanan
- 6) Sistem Manajemen Keuangan - Proses, prosedur dan alat untuk mengelola sumber keuangan dan operasi



### 3. ADVOKASI:

Dimensi ini terdiri dari 4 sub-dimensi yaitu:

- 1) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pusat
- 2) Inisiatif Advokasi Kebijakan Inisiatif untuk mendorong agenda publik, opini publik, atau undang-undang
- 3) Upaya Melobi- Keterlibatan dengan anggota parlemen untuk secara langsung mempengaruhi proses legislative
- 4) Advokasi Reformasi OMS - Inisiatif untuk mempromosikan kerangka hukum dan peraturan yang lebih menguntungkan bagi sektor OMS

### 4. PENYEDIAAN LAYANAN:

Dimensi ini terdiri dari 5 sub-dimensi yaitu:

- 1) Cakupan Barang Dan Jasa: ragam barang dan jasa yang ditawarkan
- 2) Respon ke Masyarakat - Sejauh mana barang dan jasa memenuhi kebutuhan local
- 3) Konstituensi dan Klien - Orang, organisasi dan masyarakat yang memanfaatkan atau mendapatkan keuntungan dari kinerja OMS
- 4) Pemulihan Biaya - Kapasitas untuk menghasilkan pendapatan melalui penyediaan layanan
- 5) Pengakuan dan Dukungan Pemerintah - Apresiasi pemerintah atas penyediaan layanan OMS

### 5. INFRASTRUKTUR:

Dimensi ini terdiri dari 5 sub-dimensi yaitu:

- 1) Intermediary Support Organizations (ISOs) dan Pusat Sumber Daya OMS
- 2) Organisasi Lokal Yang Memberikan Grant (dukungan pendanaan)
- 3) Koalisi OMS - Kerjasama di dalam sektor internal OMS
- 4) Pelatihan - Kesempatan pelatihan tersedia bagi OMS
- 5) Kemitraan Intersektoral - Kolaborasi antara OMS dan sektor lainnya

### 6. CITRA PUBLIK:

Dimensi ini terdiri dari 5 sub-dimensi yaitu:

- 1) Pemberitaan Media - Kehadiran OMS dan aktivitas mereka di media (cetak, televisi, radio dan online),
- 2) Persepsi Masyarakat terhadap OMS
- 3) Persepsi Dunia Usaha terhadap OMS
- 4) Hubungan Masyarakat - Upaya untuk mempromosikan citra dan aktivitas organisasi
- 5) Peraturan Internal Organisasi - Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

## ■ Peringkat Penilaian

Penjelasan Skor 1 - 7

- 1) Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **MENINGKAT** secara signifikan dengan praktik-praktik/kebijakan-kebijakan yang ada. Meskipun reformasi atau perkembangan yang diperlukan mungkin belum tercapai, namun komunitas OMS mengakui perlunya perkembangan/pembaruan dan **MEMILIKI RENCANA** serta **KEMAMPUAN** untuk mencapai hal tersebut.
- 2) Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **MENINGKAT** dengan praktik-praktik/ kebijakan yang ada. Komunitas OMS **MENUNJUKKAN KOMITMEN** untuk mengejar atau mencapai perubahan dan mengembangkan profesionalisme di bidang ini.
- 3) Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **CENDERUNG** meningkat dengan praktik-praktik/ kebijakan yang ada, atau adanya komitmen yang signifikan untuk mengembangkan aspek tersebut.
- 4) Keberlanjutan sektor masyarakat sipil **SECARA MINIMAL** dipengaruhi oleh praktik-praktik/ kebijakan yang ada. Kemajuan dapat terhambat oleh ekonomi yang stagnan, pemerintah yang pasif, media yang tidak tertarik, atau adanya komunitas aktivis yang punya kemauan namun tidak berpengalaman.
- 5) Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **AGAK TERHAMBAT** oleh praktik-praktik/kebijakan yang ada. Kemajuan dapat terhambat oleh kontraksi ekonomi (menurunnya kegiatan ekonomi), pemimpin yang otoriter dan pemerintahan yang terpusat, media yang dikendalikan dan reaksioner, atau rendahnya tingkat kapasitas, kehendak/kemauan, atau ketertarikan yang berasal dari sebagai komunitas OMS sendiri.
- 6) Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **TERHAMBAT** oleh praktik-praktik/kebijakan yang ada. Sebuah lingkungan yang tidak bersahabat, dengan kapasitas dan dukungan publik yang rendah sehingga dapat menghambat pertumbuhan sektor OMS.
- 7) Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **TERHAMBAT SECARA SIGNIFIKAN** oleh praktik-praktik/kebijakan yang ada, umumnya sebagai akibat dari pemerintahan yang otoriter yang secara agresif menentang perkembangan OMS yang independen.

## ■ Skala Penilaian

Berdasarkan Kategori

- **KEBERLANJUTAN MENINGKAT: 1 -3**
- **KEBERLANJUTAN BERKEMBANG: 3,1 - 5**
- **KEBERLANJUTAN TERHAMBAT: 5,1 - 7**

## ■ Penilaian Untuk Perubahan

Penilaian berangkat dari SKOR tahun sebelumnya

Perubahan diperkenankan hanya berkisar pada 0,1- 0,3 di dalam situasi perubahan lebih baik (skor mengecil), atau lebih buruk (skor membesar). Sebagai contoh:

-0,3	-0,2	-0,1		+0,1	+0,3	+0,3
3,8	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4

Makna perubahan tersebut adalah

0,1 perubahan Moderat

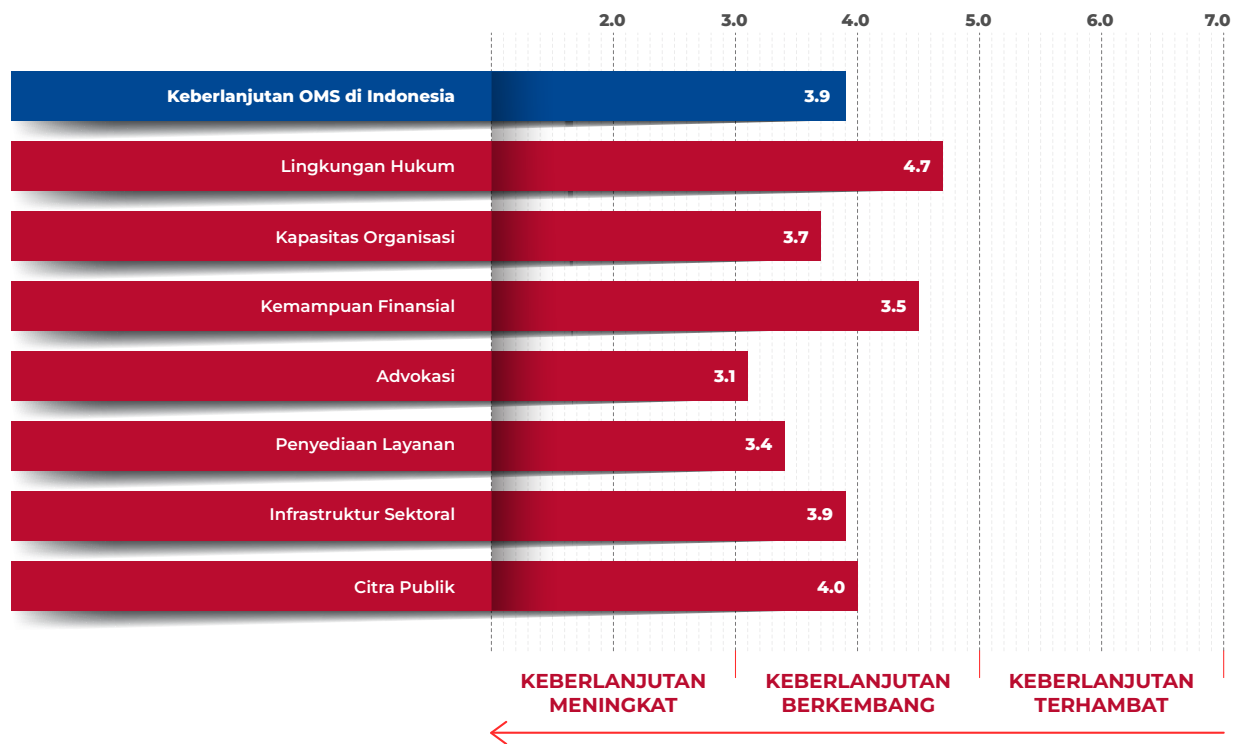
0,2 Perubahan signifikan

0,3 perubahan dahsyat dan sering tak terduga

## Proses Penilaian Dimensi

- 1) Bila merujuk pada CSOSI 2020, adakah perubahan yang terjadi dibanding tahun 2021? Berikan contoh dan informasi yang menjelaskan tren perubahan yang diamati (kenaikan atau penurunan) yang didukung oleh fakta dan data.
- 2) Bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi?
- 3) Apa faktor-faktor pendorong perubahan tersebut dan apa tantangannya?
- 4) Pengisian skor masing-masing dimensi dengan mengacu pada petunjuk pengisian skor untuk perubahan tambahan.

# KEBERLANJUTAN OMS SECARA KESELURUHAN: **3.9**



Pandemi COVID-19 menyebabkan krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial di Indonesia pada tahun 2021 seiring dengan kasus yang melonjak. Pada pertengahan Juli, Indonesia mencatat jumlah kasus harian tertinggi, dengan 56.757 kasus positif baru hanya dalam satu hari. Hingga 31 Desember, sebanyak 4.262.720 orang dinyatakan positif terpapar virus sejak awal pandemi dan 144.094 orang telah meninggal dunia. Angka tersebut meningkat secara signifikan dari 743.198 kasus dan lebih dari 22.000 kematian yang tercatat pada akhir tahun 2020.

Lonjakan kasus yang terjadi di awal bulan Juli mendesak pemerintah untuk mengubah kebijakan yang telah berlaku sejak bulan April 2020. Alih-alih menerapkan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) baru No. 25/2021. Dari bulan Juli hingga akhir tahun, pemerintah mengeluarkan enam Instruksi tambahan, termasuk penentuan pembatasan jam operasional kegiatan usaha pada sector non-esensial. Tiap provinsi dan kabupaten dapat menyesuaikan peraturan COVID-19 tersebut berdasarkan fluktuasi kasus lokal. Secara garis besar, peraturan tersebut memberi dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di tahun sebelumnya. Namun, banyaknya perubahan dan variasi dalam peraturan tersebut memunculkan kebingungan, dan peraturan itu sendiri bahkan memicu sejumlah aksi unjuk rasa di sepanjang tahun. Pada bulan Februari, Indonesia mewajibkan vaksinasi COVID-19

bagi masyarakat, dan hingga akhir tahun pemerintah telah mendistribusikan 165,2 juta dosis pertama, 113,2 juta dosis kedua, dan 1,3 juta dosis ketiga.

Perekonomian Indonesia kian memburuk akibat pandemi, dan secara langsung berdampak pada pendanaan untuk OMS, sebab sumber daya yang tersedia dialihkan untuk bantuan dan kebutuhan yang paling mendesak. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen menunjukkan peningkatan dibandingkan penurunan sebesar 2,07 persen di tahun 2020, angka pengangguran masih tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, sebanyak 21,32 juta pekerja terkena dampak pandemi di tahun 2021, termasuk 1,82 juta kehilangan pekerjaannya, hampir 1,4 juta berhenti bekerja secara sementara, dan 17,4 juta mengalami pemotongan jam kerja. Yayasan Penabulu melaporkan bahwa 33,9 persen OMS yang disurvei terkena dampak dari pandemi—secara finansial atau lainnya—dan 27,1 persen lainnya mengalami dampak yang parah.

Di tengah keadaan yang sulit ini, terdapat perkembangan yang menjanjikan untuk demokrasi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Demokrasi Freedom House dan Economic Intelligence Unit (EIU), Indonesia mencatat sedikit peningkatan di tahun 2021. Namun, Indonesia masih dinilai “semi bebas” (partly-free) oleh Freedom House dan “demokrasi yang cacat” (flawed democracy) menurut EIU, merujuk pada kondisi kebebasan pers, budaya politik anti-kritik, partisipasi politik warga yang lemah, dan kinerja pemerintah.

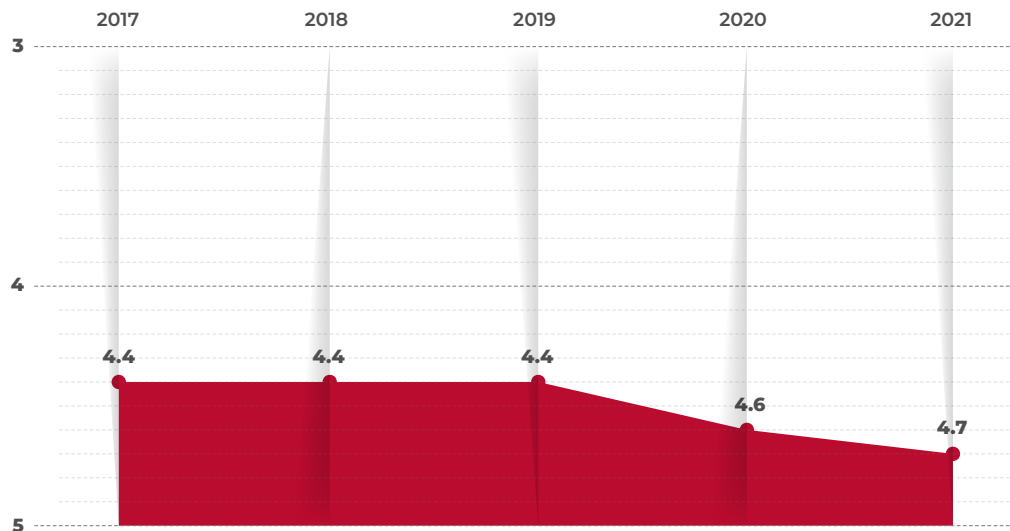
Peta politik nasional sebagian besar tidak berubah di tahun 2021. Koalisi pemerintah masih mendominasi. Koalisi ini bahkan menguat ketika satu partai lagi, Partai Amanat Nasional (PAN), bergabung dengan pemerintah pada akhir bulan Agustus. Tahun 2021 juga ditandai dengan “pemanasan politik” pada Februari 2022, ketika waktu dan detail pemilu 2024 telah diputuskan. Beberapa calon presiden potensial telah didiskusikan dan pengaruh mereka semakin terlihat di tahun 2021.

Keberlanjutan OMS di Indonesia secara keseluruhan tidak mengalami perubahan di tahun 2021, meskipun semua dimensi selain infrastruktur sektoral dan citra publik mengalami sedikit perubahan. Lingkungan hukum dan kemampuan finansial yang lebih luas untuk kinerja OMS mengalami sedikit penurunan akibat dari kombinasi kompleksnya birokrasi, kekerasan, dan dampak finansial COVID-19 yang terus berlanjut. Namun, di saat yang bersamaan, OMS membuktikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan keadaan dan menerapkan pelajaran mereka dapat di tahun pertama pandemi, seperti beralih ke metode digital dan pendekatan yang lebih kreatif dengan kelompok sasaran, pemerintah, dan sesama OMS. Strategi ini berhasil meningkatkan kapasitas organisasi, advokasi, dan penyediaan layanan.

Menurut Kementerian Hukum dan HAM, hingga awal Januari 2022, sebanyak 470.966 OMS terdaftar di Indonesia. 275.530 di antaranya berbentuk Yayasan dan 195.466 sisanya terdaftar sebagai Perkumpulan. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan yang luar biasa dibandingkan data terakhir yang tersedia, yakni total 431.500 OMS yang terdaftar per November 2019.

# 1. LINGKUNGAN HUKUM: 4.7

## LINGKUNGAN HUKUM OMS DI INDONESIA



Lingkungan hukum untuk OMS di Indonesia sedikit memburuk di tahun 2021, meneruskan tren penurunan di tahun sebelumnya. Meskipun kebijakan dan peraturan tidak berubah, OMS terus menghadapi kompleksitas dan kesewenang-wenangan birokrasi, seiring meningkatnya ancaman terhadap kebebasan berekspresi.

Kebijakan yang mengatur pendaftaran OMS tidak mengalami perubahan di tahun 2021. OMS dapat memperoleh badan hukum baik sebagai perkumpulan (organisasi berbasis anggota) atau yayasan. Yayasan diatur oleh Undang-undang Yayasan Tahun 2001, direvisi di tahun 2004, sedangkan perkumpulan diatur oleh Staatsblad (Statuta) No. 64/1870. Pendaftaran OMS diatur lebih lanjut dalam UU No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. OMS yang berbadan hukum harus menerima persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM (AHU), sedangkan OMS yang tidak memiliki badan hukum harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri. Persyaratan untuk mendapatkan SKT relatif sederhana dan gratis, tetapi OSM harus memperbarui SKT mereka setiap lima tahun.

Namun, dalam praktiknya, banyak OMS di Indonesia tidak memiliki badan hukum AHU maupun SKT. Beberapa OMS yang lebih kecil di tingkat kabupaten tidak memiliki badan hukumnya karena biaya prosesnya yang terlalu mahal. Beberapa OMS juga menganggap SKT atau badan hukum hanya diperlukan untuk bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga nasional dan internasional.

Di tahun 2021, sejumlah OMS mengalami kendala saat mendaftar, termasuk memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai contoh, beberapa notaris (yang secara

legal statusnya di bawah Kemenkumham) tidak bersedia memproses permohonan badan hukum dari OMS yang bekerja pada isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), dan meminta agar preferensi tentang komunitas dan isu LGBT dihilangkan dari anggaran dasar organisasi. Contohnya salah satu OMS, Arus Pelangi, yang membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk mendapatkan persetujuan entitas hukum, yang pada akhirnya diperoleh hanya berkat keuletannya menemukan notaris yang bersedia mempertahankan preferensi ke komunitas LGBT. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga mengalami kesulitan dalam memperoleh badan hukum untuk kantor cabangnya di sejumlah provinsi disebabkan beberapa kegiatan programnya dianggap sebagai tugas lembaga penegak hukum negara, yang bertentangan dengan peraturan tentang organisasi kemasyarakatan. Meskipun demikian, kantor cabang tersebut tetap dapat beroperasi dan bekerja melalui kantor nasional FITRA jika mereka membutuhkan status sebagai entitas hukum untuk bekerja dengan lembaga lain.

Sejumlah OMS yang bekerja untuk reintegrasi sosial mantan pendukung ISIS, termasuk Asian Muslim Action Network (AMAN) dan anggota Kelompok Pekerja Perempuan untuk Mencegah/Melawan Ekstremisme Kekerasan, sebelumnya tidak diwajibkan untuk memiliki badan hukum atau SKT. Namun, di tahun 2021, pemerintah desa mewajibkan badan hukum atau SKT agar dapat meneruskan kegiatannya di wilayah tersebut. OMS yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dilarang beraktivitas di desa. Dalam kasus tersebut, persyaratan badan hukum atau SKT yang semakin ketat dianggap sebagai upaya untuk menghambat OMS bekerja pada isu-isu sensitif.

Sejumlah OMS yang mengoperasikan media nirlaba independen juga mengalami kesulitan dalam mendaftar ke Dewan Pers pada tahun 2021. Karena media diwajibkan untuk berstatus sebagai perusahaan terbatas agar dapat mendaftar, perkumpulan dan yayasan tidak memenuhi syarat ini. Hal ini menimpa juga, sebagai contoh, KONDE, yang didirikan oleh para aktivis perempuan dan Media Berita Jejaring Sosial Nusantara. Diperlukan status terdaftar di Dewan Pers untuk mendapatkan kemudahan akses arbitrase di Dewan Pers.

Kebebasan berekspresi semakin terancam di tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan Tindakan SLAPP oleh pemerintah untuk membungkam dan mengintimidasi suara-suara kritis. Sebagai contoh, pejabat pemerintah mengajukan dakwaan terhadap empat orang aktivis hak asasi manusia pada tahun 2021: dua orang dilaporkan oleh Menko Maritim atas pernyataan terkait dugaan keterlibatannya dalam bisnis pertambangan, dan Kepala Staf Kepresidenan melaporkan dua peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) atas tuduhan fitnah karena mempersangkutkan dirinya dengan pemburu rente dalam peredaran Ivermectin. Walau para peneliti belum dipanggil oleh polisi, kasus yang menimpa kedua aktivis tersebut masih terus berlangsung. Pada bulan November, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengancam akan melakukan audit terhadap LSM karena diduga menyebarkan informasi palsu tentang deforestasi di bawah pemerintahan saat ini. Koalisi LSM, termasuk Greenpeace dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menganggap ancaman untuk mengaudit tersebut sebagai sarana untuk membungkam kritik. Mereka menerbitkan pernyataan bersama sebagai tanggapan. Hingga kini belum ada tindakan lebih lanjut.

Juga di tahun 2021, seorang anonim melakukan gangguan secara daring kepada aktivis dan pembicara ICW pada konferensi pers yang diselenggarakan untuk menanggapi ancaman pemecatan tujuh puluh lima pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengkritik kepemimpinan KPK saat ini. Gangguan itu termasuk meretas tautan Zoom, menampilkan video porno, dan robocalls.



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat adanya enam belas kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM dari Januari hingga Agustus 2021, mulai dari serangan fisik dan penangkapan hingga penahanan, proses hukum, dan perampasan tanah. Meskipun data untuk setahun penuh belum tersedia, terlihat ancaman dan pelanggaran cenderung meningkat selama beberapa tahun terakhir, yang sering dilakukan oleh aktor negara. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga mencatat adanya dua puluh lima kasus aktivis hak lingkungan yang dituduh melakukan tindak pidana pada tahun 2021, selain kasus penangkapan sewenang-wenang, kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran lainnya terhadap pembela hak asasi manusia. Dalam dua puluh lima kasus pidana tersebut, total sembilan puluh empat orang ditangkap, termasuk pribumi, warga sipil, dan pendamping hukum masyarakat.

OMS masih menerima pembebasan pajak atas penghasilan dari hibah, sumbangan, dan warisan, serta zakat (untuk OMS pengumpul zakat yang disahkan oleh pemerintah). Namun, prosedur untuk mengajukan pembebasan tersebut sangat birokratis dan berbelit-belit. Pengurangan pajak penghasilan terbatas tersedia untuk orang atau badan yang berkontribusi dalam membantu bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan atau olahraga, atau pembangunan infrastruktur sosial.

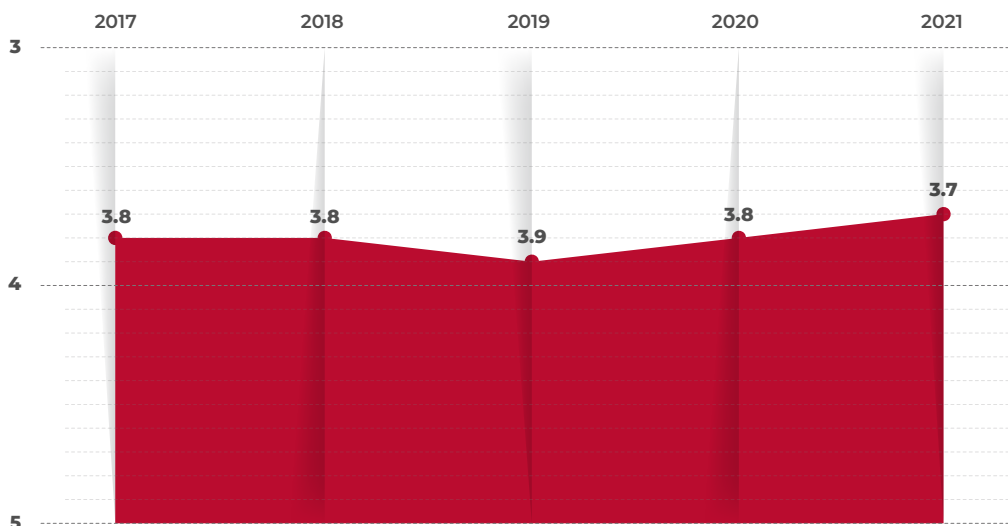
Perkumpulan tidak boleh terlibat dalam kegiatan ekonomi. Yayasan dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan mendirikan badan usaha atau menginvestasikan hingga 25 persen dari total kekayaan mereka di perusahaan; keuntungan dari kegiatan tersebut akan dikenakan pajak. Peraturan Mendagri No. 30/2008 mengatur tata cara organisasi publik untuk dapat menerima bantuan dari pihak asing dan menetapkan bahwa organisasi tersebut harus terdaftar serta Kemendagri harus menyetujui rencana penerimaan bantuan asing. Namun, aturan ini biasanya tidak diterapkan sepenuhnya dan sebagian besar OMS tidak mengikutinya, meskipun beberapa lembaga donor mensyaratkan persetujuan pemerintah untuk penerima hibah mereka.

Bantuan hukum untuk OMS masih tersedia di ibu kota negara dan provinsi, tetapi jarang tersedia di tingkat kabupaten. Walaupun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) memiliki kapasitas yang cukup di tingkat nasional dan daerah, mereka hanya memiliki kantor di ibu kota dan ibu kota provinsi.



## 2. KAPASITAS ORGANISASI: 3.7

### KAPASITAS ORGANISASI OMS DI INDONESIA



Kapasitas organisasi sektor OMS terus mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 karena, terlepas dari masalah pembatasan akibat pandemi yang terus berlanjut, OMS memperkuat dan memperluas jangkauan dan kelompok sasaran mereka, terutama melalui penggunaan teknologi digital. Biaya komunikasi daring yang relatif murah membuat OMS seperti Yayasan Bhakti dapat menjangkau lebih banyak kelompok sasaran dengan biaya yang lebih sedikit dibandingkan melakukan kunjungan ke lokasi kelompok sasaran. Jaringan seperti AMAN Indonesia juga menggunakan komunikasi daring untuk lebih memahami kebutuhan kelompok sasaran dan dampak proyek melalui pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. Proyek MADANI USAID lebih lanjut mendorong pembangunan konstituensi OMS pada tahun 2021 melalui Program Peningkatan Kapasitas OMS, bekerja sama dengan empat puluh empat OMS lokal di tiga puluh dua kabupaten di enam provinsi. Menurut penelitian PRAKARSA dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tingkat partisipasi OMS di enam provinsi tersebut sangat tinggi, yang juga sebagian besar ditunjang oleh peningkatan penggunaan komunikasi daring.

Sama halnya di seluruh sektor, kapasitas OMS untuk perencanaan strategis terus mengalami peningkatan. Banyak OMS yang memberikan perhatian khusus pada perencanaan strategis di tahun 2021, menyadari bahwa hal tersebut dapat mendorong peluang pendanaan dan kolaborasi yang lebih besar. Menurut laporan Prioritas Riset Nasional 2021 "Mengukur Indeks Tata Kelola CSO dalam Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia," OMS di Indonesia umumnya memiliki visi dan misi yang jelas, yang digunakan sebagai dasar rencana strategis mereka.

Sebagian besar OMS memiliki struktur manajemen internal yang fleksibel berdasarkan kebutuhan program dan berupaya untuk benar-benar bertanggung jawab secara terpisah dalam pengambilan keputusan, implementasi, dan kontrol. Tingkat keterlibatan board (pengurus Yayasan) bervariasi

tergantung pada kebutuhan dan sumber daya OMS. Pada tahun 2021, beberapa board lebih aktif terlibat dalam memberikan tanggapan dari organisasi mereka terhadap krisis COVID-19 baik di tingkat kebijakan maupun praktik, terutama di organisasi masyarakat sipil yang lebih kecil. Namun, secara umum, sebagian besar board cenderung tidak terlalu terlibat dalam tata kelola organisasi. Proyek USAID MADANI tetap bekerja sama dengan mitra OMSnya untuk memperkuat manajemen internal dan keempat puluh empat OMS tersebut sekarang memiliki SOP (Standard Operational Procedure).

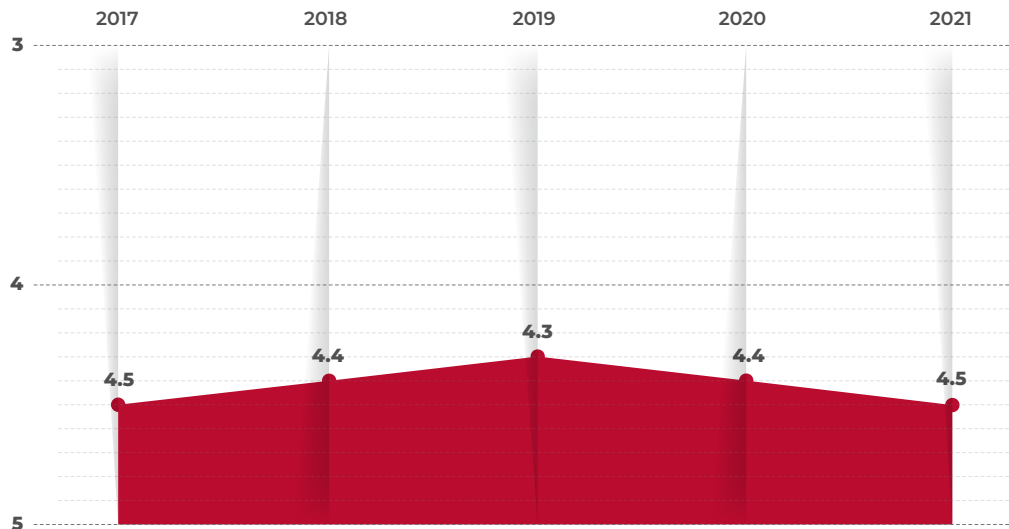
Pada tahun 2021, banyak OMS yang masih menerapkan bekerja dari rumah. Pertemuan tatap muka dilakukan hanya saat diperlukan dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Beberapa OMS nasional, seperti Institut Kapal Perempuan, meresmikan aturan bekerja dari rumah mereka secara tertulis. Pada tahun 2021, banyak OMS juga berupaya untuk meningkatkan fleksibilitas dan lebih melibatkan staf mereka sambil beradaptasi dengan perubahan budaya dan lingkungan kerja.

Gaji dan tunjangan staf OMS sangat bervariasi dari satu organisasi dan provinsi ke provinsi lainnya. Menurut penelitian PRAKARSA, misalnya, OMS di Sumatera Utara, Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Yogyakarta (DIY), mematuhi sistem upah minimum (UMR) secara ketat. Namun, beberapa OMS tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membayar staf sesuai dengan sistem tersebut. Dan di Sulawesi Selatan, hanya satu dari sebelas responden survei OMS yang mampu membayar staf sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan oleh sistem UMR. Oleh karena itu, isu kepegawaian dan rekrutmen tetap menjadi perhatian khusus bagi OMS, dan karena banyak yang bekerja berdasarkan proyek, sulit untuk mempertahankan staf. Sebaliknya, beberapa OMS merekrut relawan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Meskipun tidak ada data jelas yang tersedia, diperkirakan bahwa setidaknya 80 persen OMS melibatkan sukarelawan dalam pekerjaan mereka. Menurut Charities Aid Foundation's (CAF) World Giving Index 2021 melaporkan dari data tahun 2020, Indonesia memiliki tingkat kesukarelawanan tertinggi di antara negara-negara yang diteliti, dengan 60 persen responden mengaku pernah menjadi sukarelawan di bulan sebelumnya; sebagian besar dari kesukarelawanan itu, bagaimanapun juga, cenderung dilakukan untuk tujuan keagamaan, tidak harus dengan organisasi masyarakat sipil.

Internet dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar kegiatan operasional OMS, dan OMS terus mengembangkan kapasitas teknis dan penggunaan TIK mereka secara signifikan pada tahun 2021. Sebagian besar OMS menggunakan situs web, media sosial, dan perangkat lunak keuangan untuk mendukung pekerjaan mereka. Namun, keamanan data tetap menjadi sebuah ancaman. Pada tahun 2021, terdapat sejumlah laporan kebocoran data dari kantor pemerintah, perusahaan, dan OMS. Beberapa OMS lokal, terutama yang berada di daerah pedesaan, masih memiliki akses terbatas ke TIK atau kekurangan perangkat teknologi, bandwidth, dan keterampilan teknis untuk pekerjaan berbasis daring.

### 3. KEMAMPUAN FINANSIAL: 4.5

#### KEMAMPUAN FINANSIAL OMS DI INDONESIA



Kemampuan finansial OMS mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 akibat dampak ekonomi yang masih berlangsung dari pandemi COVID-19 dan penurunan pendanaan dalam dan luar negeri di seluruh sektor.

OMS di Indonesia secara umum masih mendapatkan pendanaan dari beragam sumber: donor asing (negara dan non-negara); pemerintah Indonesia, melalui bantuan langsung atau proyek; perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR); publik, melalui penggalangan dana atau iuran; dan bisnis internal, melalui penyediaan layanan atau usaha sosial. Keberagaman sumber pendanaan OMS biasanya bergantung pada jenis kegiatan yang dijalankannya. Menurut Lembaga Penelitian SMERU, OMS yang melakukan penelitian kemungkinan besar memiliki beberapa sumber pendanaan. Pada tahun 2021 ini juga, proyek MADANI memberikan bantuan teknis untuk OMS di tiga puluh dua kabupaten untuk mendiversifikasi pendanaan mereka.

Bantuan dari luar negeri secara keseluruhan mengalami penurunan sejak tahun 2008, saat Indonesia bergabung dengan G20. Modus pendanaan yang biasa dilakukan juga telah berubah: lembaga pendanaan yang sebelumnya memberikan dukungan program dan kelembagaan yang substansial, sekarang sering mempekerjakan hanya satu atau dua orang dari OMS mitra. Namun, pada tahun 2021, OMS menerima pendanaan yang cukup besar dari beberapa donor asing. Sebagai contoh, Program United Nations Development Programme (UNDP) mendanai OMS untuk mengimplementasikan program kewirausahaan, termasuk peningkatan kapasitas, agar mendorong pemulihan ekonomi di negaranya. Uni Eropa (UE) menyediakan anggaran sebesar Rp 108,5 miliar (sekitar \$7,3 juta) untuk mendukung upaya OMS mengatasi dampak kesehatan dan dampak sosial akibat krisis COVID-19. Salah satunya, bekerja sama dengan Yayasan Penabulu yang meluncurkan proyek Co-Evolve, dan memberikan dukungan langsung kepada 200 CSO

lokal di 34 provinsi di seluruh negeri. Proyek MADANI USAID kerap menjadi sumber dukungan yang signifikan pada tahun 2021 dan akan mengalokasikan dana sebesar \$19,8 juta antara tahun 2019 dan 2023.

Untuk memperoleh dana dari APBN dan APBD, OMS harus memiliki badan hukum dan SKT. Pada tahun 2021, OMS bersaing untuk mendapatkan hibah pemerintah sesuai dengan Peraturan Mendagri No.123/2018. Karena sebagian besar dana pemerintah dialokasikan ke OMS melalui pemerintah daerah, sulit untuk mengetahui total bantuan dari pemerintah. Kabupaten Sukoharjo, misalnya, menyalurkan hibah sebesar Rp5 miliar (\$337.300), Kabupaten Tulungagung (Jawa Timur) Rp1,6 miliar (\$108.000), dan Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat) Rp400 juta (\$27.000) kepada lima organisasi. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memberikan hibah sejumlah Rp23,5 miliar (\$1,58 juta) kepada 108 OMS. Juga pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM menyalurkan Rp53 miliar (\$3,6 juta) kepada OMS yang memberikan bantuan hukum kepada konstituen mereka secara gratis.

Namun, hasil penelitian PRAKARSA menunjukkan bahwa dukungan pemerintah biasanya hanya menutupi sebagian dari total biaya proyek OMS, sehingga OMS harus membayar sisanya. Mayoritas OMS (60 persen) menyatakan bahwa dana pemerintah hanya mencakup 25 persen atau kurang dari proyek yang dibiayai; 16 persen OMS melaporkan bahwa mereka menerima 25 sampai 50 persen dari kebutuhan proyek, dan hanya 12 persen yang mengindikasikan bahwa mereka menerima 75 persen atau lebih biaya proyek dari pemerintah.

Pada tahun 2021, pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Revisi ini memudahkan akses OMS ke dana pemerintah dengan menghapus persyaratan audit keuangan dalam mekanisme swakelola Tipe 3, salah satu dari empat mekanisme kerja sama antara pemerintah dengan pihak lain.

Pada akhir tahun 2021, Kelompok Kerja untuk Dana Abadi OMS—terdiri dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Konsil LSM Indonesia, Yayasan Penabulu, Institut Kapal Perempuan, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA), PRAKARSA, Transparansi International Indonesia (TII), dan Resource Management and Development Consultant (REMDEC)—menyampaikan rancangan Peraturan Presiden tentang pembentukan Dana Abadi OMS. Usulan peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi OMS yang terlibat dalam proses pembangunan dan demokratisasi.

Pendanaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility-tanggung jawab sosial perusahaan) masih lazim dilakukan, dan pada tahun 2021 pendanaan dari CSR Bursa Efek Indonesia (BUI), PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodia Sentral Efek Indonesia (KSEI), di antaranya, memberikan donasi kepada Palang Merah Indonesia (PMI) berupa peralatan senilai Rp10,3 miliar (sekitar \$700.000). Kampanye #InvestasiAndaMenolongSesama masih terus dilakukan sebagai platform untuk dukungan CSR kepada OMS, tetapi belum ada laporan jumlah yang terkumpul pada tahun 2021.

PMI juga menghimpun dana masyarakat sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2019; setiap pemerintah daerah lantas dapat membuat peraturan berdasarkan undang-undang tersebut, mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai mekanisme seperti alokasi pajak. Pada tahun 2021, PMI Kota Bekasi menerima lebih dari Rp2,3 miliar (\$155.000); PMI di Kabupaten Pati menerima Rp1,9 miliar, meningkat dari Rp1,6 miliar pada

tahun 2020 (\$128.000 dan \$108.000); PMI di Kabupaten Kendal menerima hampir Rp1,3 miliar, dibandingkan dengan Rp 800 juta pada tahun 2020 (\$88.000 dan \$54.000); dan PMI Kota Jakarta Timur menerima Rp10 miliar, naik dari Rp 9 miliar (\$673.000 dan \$606.000).

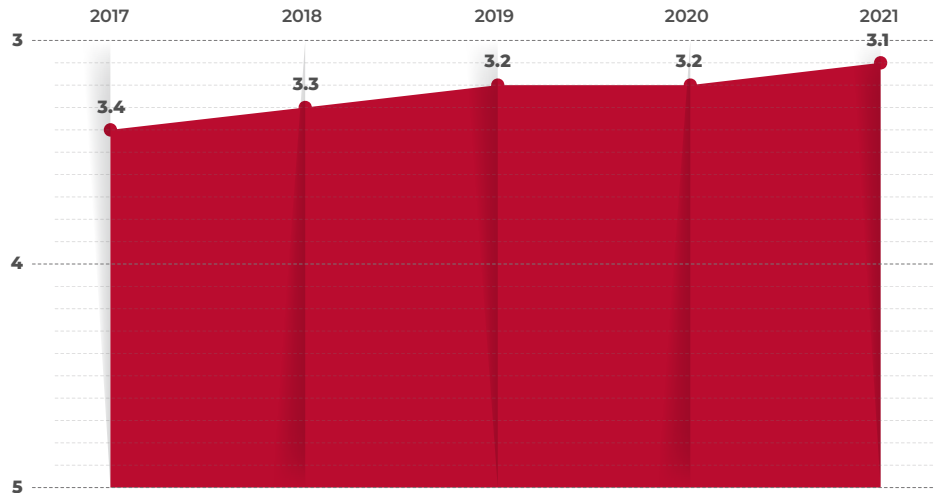
Menurut Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS), jumlah pemberian amal dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp11,5 triliun pada tahun 2021 (sekitar \$785 juta), meningkat 20 persen dibandingkan Rp9,2 triliun (\$620 juta) yang terkumpul pada tahun 2020. Sekitar 70 persen dari jumlah tersebut berasal dari individu berusia 25–44 tahun, menunjukkan kecenderungan baru yaitu peningkatan pemberian dari generasi muda.

Di tahun 2020, delapan dari sepuluh orang di Indonesia melakukan donasi, menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan di dunia, menurut CAF World Giving Index 2021. Sebagian besar donasi datang dalam bentuk zakat. Sebagian besar OMS masih awam dalam penggunaan platform digital untuk penggalangan dana, dan dana yang dihimpun melalui platform daring seperti Kitabisa.com memiliki jumlah yang terbatas.

Sebagian besar OMS, terutama yang beroperasi di tingkat nasional, mampu mempraktekkan pengelolaan keuangan yang baik; tetapi, organisasi yang lebih kecil kerap mengalami kekurangan kapasitas staf serta perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Beberapa OMS secara teratur membuat laporan keuangan mereka dapat dilihat publik secara online. Dari lima belas sampel OMS nasional, hanya empat yang mengunggah laporan keuangannya. Undang-Undang Yayasan mewajibkan yayasan yang menerima sumbangan dari negara, pihak luar negeri, atau pihak ketiga dengan jumlah total Rp500 juta (sekitar \$34.300) atau lebih untuk diaudit oleh akuntan publik dan menerbitkan ringkasan laporan tahunan mereka di surat kabar harian berbahasa Indonesia, tetapi beberapa OMS masih tidak mampu membayar jasa akuntan publik.

## 4. ADVOKASI: 3.1

### ADVOKASI OMS DI INDONESIA



Advokasi OMS mengalami sedikit peningkatan di tahun 2021 seiring dengan meningkatnya kerja sama dengan pemerintah dan sesama OMS. Sejumlah kampanye advokasi oleh OMS berlangsung dengan sukses sepanjang tahun.

OMS terus bekerja sama dengan pemerintah di berbagai tingkatan. Kerja sama ini semakin kuat pada tahun 2021 karena OMS dapat beradaptasi secara lebih baik dalam bekerja dengan konteks pembatasan COVID-19, dan khususnya berjasa dalam penanganan dan pemulihan COVID-19.

Konsorsium LinkLSM—dibentuk pada tahun 2020 oleh Akatiga, Konsil LSM Indonesia, Sekretariat Nasional FITRA, dan YASMIB Sulawesi—mengembangkan basis data dan platform untuk menampilkan OMS yang eligible untuk menjadi partner penyediaan barang dan jasa pemerintah. Konsorsium ini juga mendorong praktik baik OMS yang telah berhasil bekerja sama dengan pemerintah dalam Swakelola Tipe 3, dan pada tahun 2021, konsorsium berhasil mengadvokasi revisi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 untuk menghapus persyaratan audit bagi OMS yang terlibat melalui mekanisme tersebut.

AMAN Indonesia masih menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Melalui kerja sama tersebut, AMAN Indonesia, dengan dukungan Kementerian PPPA, berhasil mendorong terbentuknya peraturan resmi untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Beberapa OMS juga menjalin kerja sama yang baik dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan beberapa kementerian lainnya, dan pada Januari 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme. Rencana tersebut disusun berdasarkan masukan



dari OMS dan secara eksplisit menyerukan keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya mencegah gerakan ekstremisme.

OMS secara aktif terlibat dalam berbagai kampanye advokasi, sidang pemeriksaan, dan lobi di tingkat nasional dan daerah sepanjang tahun. Advokasi dalam upaya penolakan UU Cipta Kerja tidak begitu berjalan dengan baik di tahun 2021: setelah kerja sama, organisasi, dan kampanye masyarakat sipil yang secara aktif menentang undang-undang tersebut di tahun 2020 dan 2021, beberapa OMS mengajukan Hak Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi, yang pada bulan Desember 2021 menyatakan undang-undang tersebut “inkonstitusional bersyarat” karena tidak selaras dengan formula standar peraturan perundang-undangan dan memerintahkan legislator untuk merevisi undang-undang tersebut dalam waktu dua tahun. Sementara itu, pemerintah dilarang menerbitkan peraturan pelaksanaan yang baru. Namun, undang-undang tersebut—yang disahkan tanpa mempertimbangkan konsultasi publik dan meskipun banyak diprotes—akan tetap berlaku seraya menunggu revisi.

Pada tahun 2021, OMS juga berhasil mendorong pengesahan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS), yang kemudian menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 lebih lanjut mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan korban kekerasan seksual dalam sektor pendidikan. Walaupun terlihat adanya kemajuan dalam isu kekerasan seksual, tetapi kelompok-kelompok Islam tertentu menentang kedua upaya tersebut, dengan berpendapat bahwa larangan seks di luar nikah harus diatur juga. RUU TPKS masuk dalam legislasi prioritas DPR dan menunggu persetujuan final parlemen pada akhir 2021.

OMS juga melakukan advokasi mengenai isu tersebut melalui audiensi dan lobi di tingkat lokal. Sebagai contoh, GMBI melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mewakili suara para pedagang kaki lima yang terancam penggusuran. Keputusannya, otoritas pemerintah sepakat untuk menertibkan pedagang kaki lima tanpa menggusur mereka.

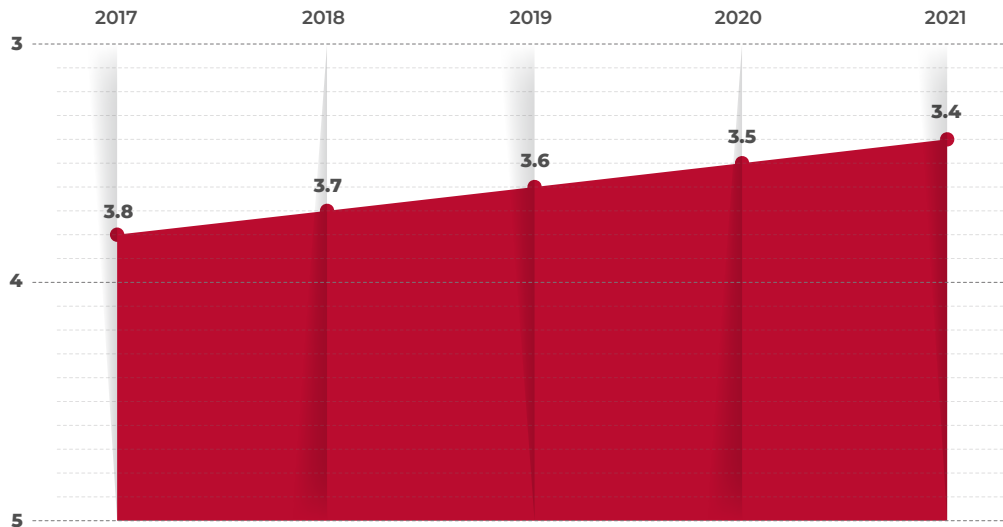
OMS juga telah membangun kerja sama yang kuat dengan pemerintah daerah seputar masalah kesehatan, khususnya di enam provinsi yang menjadi tuan rumah OMS yang didukung oleh proyek MADANI. Berkat advokasi OMS, beberapa pemerintah di tingkat desa juga telah mengeluarkan peraturan resmi tentang penggunaan dana desa untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut.

Isu perubahan iklim dan lingkungan juga menjadi masalah utama dalam advokasi OMS pada tahun 2021. Upaya Seknas FITRA untuk mendorong ekonomi hijau berhasil dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran khusus untuk isu perubahan iklim. Di tingkat desa, konsorsium ECHO Green mendorong pembuatan peraturan desa untuk mendukung ekonomi hijau, dan pada tahun 2021 mereka memberikan pendampingan kepada petani perempuan dan pemuda di sembilan puluh sembilan desa di tiga kabupaten untuk diadvokasi agar mendorong pembuatan peraturan desa.

OMS juga terus melakukan advokasi untuk reformasi yang berdampak pada sektor OMS itu sendiri. Pada tahun 2021, Kelompok Kerja untuk Dana Abadi OMS dibentuk untuk mendorong lebih banyak pendanaan pemerintah untuk OMS. Untuk itu, Kelompok Kerja ini menerbitkan kajian yang kemudian digunakan sebagai bahan advokasi dalam diskusi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kantor Staf Presiden.

## 5. PENYEDIAAN LAYANAN: 3.4

### PENYEDIAAN LAYANAN OMS DI INDONESIA



Penyediaan layanan OMS mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021, meneruskan perkembangan yang baik selama lima tahun terakhir. Meski pandemi COVID-19 memaksa agar OMS beradaptasi, pada tahun 2021, OMS lebih mampu menyesuaikan diri dalam situasi yang sulit. OMS juga mulai mengalihkan fokus mereka kembali ke layanan sebelumnya dan berjangka panjang, di samping terus menangani kebutuhan darurat, dan semakin banyak menggunakan teknologi digital dalam melakukannya.

OMS terus memberikan layanan di bidang kesehatan reproduksi, hukum, pendampingan kelompok rentan, advokasi, dan pendidikan. Pada tahun 2021, mereka juga senantiasa beradaptasi dengan pembatasan dan tindakan pencegahan COVID-19 dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital, termasuk media sosial untuk menjangkau publik dan pertemuan yang diadakan melalui platform daring seperti Zoom. Organisasi membuat lebih banyak konten digital dan menggemakan upaya Kementerian PPPA untuk meningkatkan literasi digital, khususnya untuk memberdayakan perempuan dan memerangi kekerasan daring berbasis gender.

OMS juga mengembangkan layanan baru sebagai tanggapan terhadap krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Sejumlah OMS, antara lain Kantor Berita Anak Indonesia, Paritas Institute, Lembaga Partisipasi Perempuan, dan Gen Indonesia, memprakarsai kampanye #GerakanBantuKeluarga untuk menyalurkan bantuan kepada anak yatim korban COVID-19. Beberapa OMS, seperti Konferensi Agama dan Perdamaian Indonesia, terus membagikan makanan kepada pasien COVID-19 yang sedang menjalankan isolasi.

Layanan yang disediakan OMS berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan isu-isu di area fokus khusus mereka. Mengingat selalu adanya permintaan selama krisis kesehatan, mereka



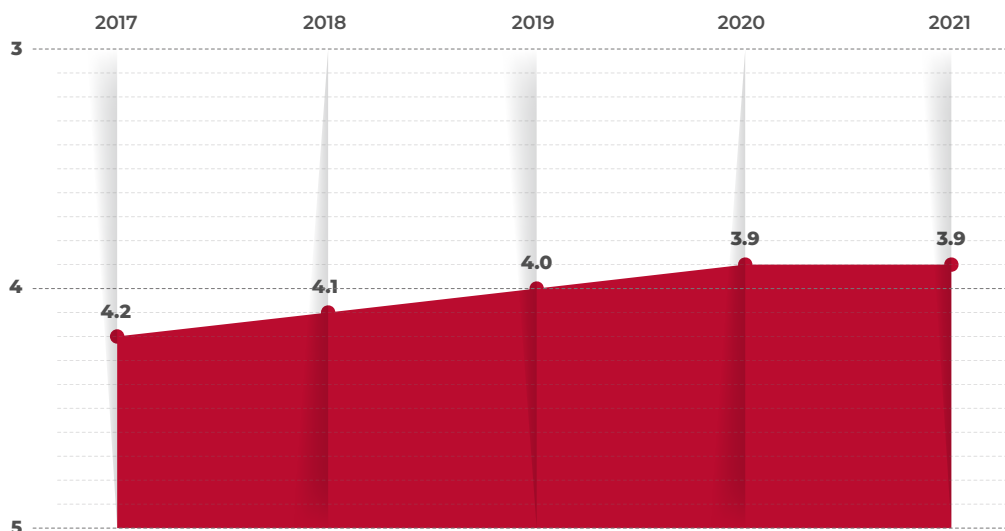
juga kerap memberikan layanan kepada masyarakat yang bukan anggota dan kelompok sasaran mereka sendiri. Mereka tetap cakap dan responsif terhadap kebutuhan darurat di tahun 2021, seperti halnya di tahun 2020 saat merebaknya COVID-19. Sebagai contoh, Yayasan Pulih yang memberikan layanan konseling bagi korban kekerasan seksual, memberikan perhatian khusus pada jenis kerentanan yang berpotensi muncul akibat pandemi COVID-19.

Sebagian besar layanan OMS disediakan secara gratis. Pendapatan beberapa OMS diperoleh melalui layanan berbayar, tetapi model tersebut justru semakin populer. Sebagai contoh, Yayasan Insan Sembada menawarkan jasa konsultasi untuk pelatihan, penelitian, perancangan program, dan keterlibatan masyarakat melalui media. Seknas FITRA juga mengembangkan layanan konsultasi anggaran untuk pemerintah daerah. Beberapa OMS juga memperoleh biaya dari sejumlah layanan melalui pengadaan pemerintah, seringnya menggunakan mekanisme swakelola Tipe 3 yang disebutkan di atas, yang menciptakan peluang baru dan mendorong keberagaman layanan yang dapat disediakan oleh OMS.

Pemerintah terus mendukung layanan OMS dengan positif dan kerja sama antara OMS dan pemerintah semakin kuat sepanjang tahun. Hal ini juga terlihat dari semakin mudahnya proses bagi OMS untuk mengakses dana pemerintah, sebagaimana dibahas di atas. Namun, secara umum, pernyataan resmi mengenai kontribusi OMS tidak lazim dikeluarkan.

## 6. INFRASTRUKTUR SEKTORAL: 3.9

### INFRASTRUKTUR SEKTORAL OMS DI INDONESIA



Infrastruktur yang mendukung sektor OMS di Indonesia sebagian besar tidak mengalami perubahan di tahun 2021, meskipun sejumlah inisiatif baru menunjukkan peluang untuk membaik di masa mendatang.

Sejumlah organisasi di tingkat nasional, termasuk Yayasan Penabulu, Yayasan KEHATI, dan Yappika, berperan sebagai Intermediary Support Organization (ISO). Pada tahun 2021, Yayasan Penabulu mengembangkan beberapa inisiatif baru, termasuk Resource-Hub for Financial Resilience, yang didukung oleh Ford Foundation. Beberapa pusat sumber juga masih melayani OMS. Sebuah inisiatif di Universitas Trisakti, misalnya, membantu OMS dalam mengembangkan usaha sosial. Simpulmadani yang diprakarsai oleh Yayasan Penabulu, Pusat Penelitian dan Advokasi Kepentingan Umum (PIRAC), Satudunia, dan Sinergantara, didukung oleh USAID MADANI, mengembangkan platform pembelajaran dan forum daring untuk meningkatkan kapasitas OMS. Learning Center for CSOs (LEARN) juga menyediakan video pelatihan untuk OMS.

Pada bulan Maret 2021, enam puluh dua OMS di tiga puluh empat provinsi meluncurkan jaringan OMS Lokadaya, yang bertujuan untuk menggerakkan, berbagi, dan mengelola sumber daya dalam negeri untuk kontribusi OMS yang berkelanjutan bagi pembangunan inklusif Indonesia. Melalui program Co-Evolve, Yayasan Penabulu dan Yayasan SKALA juga telah membangun pusat sumber daya OMS yang masih dalam tahap pengembangan, dan pada tahun 2021 mereka membuat serangkaian seminar khusus tentang tanggapan OMS terhadap COVID-19 di Indonesia.

Pada tahun 2021, beberapa OMS memberikan hibah berupa dana asing untuk mendukung LSM lokal. IKA dan Komnas Perempuan membuka hibah Pundi Perempuan 2021, dan Yayasan KEHATI meminta proposal dari anggota Pejuang Keanekaragaman Hayati. Yayasan Penabulu menerbitkan

proposal untuk Program Hibah Kecil SGP Indonesia Siklus 3, dengan total anggaran EUR 847.170 untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati.

Koalisi OMS mengalami pertumbuhan di tahun 2021, dengan bekerja sama dalam berbagai agenda. Selain Lokadaya dan Simpulmadani, AMAN Indonesia menggandeng 49 kelompok pemuda dari seluruh tanah air untuk mengkampanyekan RUU PKS. Konsorsium LinkLSM juga menyediakan database OMS yang memenuhi syarat untuk pengelolaan mandiri Tipe 3 dan mendorong praktik baik bagi OMS yang memperoleh dana dari pemerintah melalui mekanisme tersebut. Pada tahun 2021 juga, beberapa OMS membentuk Koalisi Adaptasi untuk bekerja sama dalam isu seputar perubahan iklim.

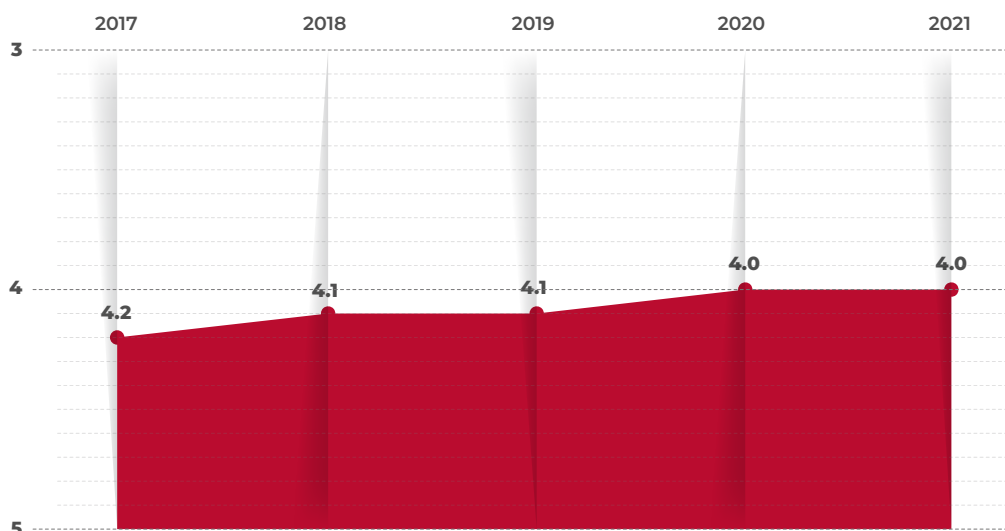
Forum daring berkembang dengan baik, dan kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan selalu terbuka baik secara daring maupun luring. Pelatihan yang diadakan oleh Simpulmadani, Lokadaya, Indorelawan, dan yang lainnya mengangkat topik-topik seperti manajemen strategis, manajemen keuangan, penggalangan dana, advokasi, dan pengembangan relawan. Namun, dilaporkan bahwa OMS kekurangan pelatihan yang memadai tentang pengembangan kelompok sasaran dan manajemen internal. Kementerian Pendidikan juga mendukung peningkatan kapasitas OMS, dan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Yayasan SATUNAMA memberikan pelatihan berbayar tentang tata kelola organisasi.

Di tengah tantangan akan perbedaan bidang prioritas dan sikap sektoral, OMS berupaya untuk memperkuat kerja sama lintas sektor pada tahun 2021. Sebagai contoh, sejak bulan November 2019, Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia telah bekerja sama dengan perusahaan nutrisi global, Herbalife Nutrition, melalui Herbalife Nutrition Foundation untuk membangun fasilitas sanitasi yang sehat, mendukung pendidikan kesehatan, dan memerangi gizi buruk yang disebabkan kurangnya fasilitas sanitasi. Pada tahun 2021, program ini diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat, khususnya di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang.

Kemitraan OMS dengan lembaga pemerintah dan negara juga semakin kuat, terbukti dengan ditandatanganinya sejumlah nota kesepahaman (MOU). Sebagai contoh, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menandatangani dua MOU dengan Yayasan Ekosistem Medan Lestari untuk bekerja sama dalam melestarikan sumber daya alam dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Daurmala menandatangani MOU dengan Kantor Urusan Agama tentang pencegahan perkawinan anak; dan LPSK menandatangani MOU dengan LBH Ansor untuk memperkuat layanan perlindungan saksi dan korban. Kolaborasi semacam itu juga terdapat di tingkat lokal. Sebagai contoh, pemerintah Kabupaten Lembata (Nusa Tenggara Timur) mulai bekerja sama dengan Koalisi Adaptasi untuk memperkuat suara aksi perubahan iklim yang berkeadilan.

## 7. CITRA PUBLIK: 4.0

### CITRA PUBLIK OMS DI INDONESIA



Citra publik OMS secara keseluruhan tidak mengalami perubahan pada tahun 2021.

Kegiatan OMS semakin banyak diliput oleh media di tingkat nasional dan daerah, baik televisi maupun media daring. Kegiatan OMS terkait COVID-19 masih menjadi hal yang paling banyak diliput, diikuti dengan beberapa kegiatan advokasi, terutama kampanye dukungan RUU Tindak Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun, cakupannya terbatas untuk kegiatan di tingkat akar rumput dan untuk organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk komunitas LGBT.

Hasil kerja OMS juga dapat diketahui oleh publik yang lebih luas pada tahun 2021, didorong oleh penggunaan media sosial mereka. Selain WhatsApp, Facebook, dan Instagram, sejumlah OMS kini juga mengelola akun YouTube dan mengadakan podcast. FITRA, misalnya, mengembangkan FITRA TV dan jaringan podcast dengan simpul di tiga belas provinsi. Kolaborasi OMS dengan media juga terus berkembang, dan pada tahun 2021, Tempo bekerja sama dengan AMAN dan FITRA untuk mengembangkan konten daring dan memastikan kegiatan OMS di level akar rumput dapat diliput.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap OMS tidak mengalami perubahan. Berdasarkan hasil survei Edelman Trust Barometer yang dirilis pada Januari 2022, 68 persen responden menyatakan bahwa mereka percaya dengan LSM, angka yang lebih rendah dibandingkan kepercayaan kepada pemerintah (70 persen) dan pada lembaga bisnis (81 persen). Untuk sumber informasi, responden kembali lebih cenderung percaya dengan pemerintah, bisnis, dan media. Karena masih ada sejumlah "OMS palsu" yang memeras lembaga bisnis dan pejabat pemerintah, masyarakat tetap mewaspadaai hal ini dan seringkali tidak bisa membedakan antara OMS yang benar dan yang palsu.

Persepsi pemerintah terhadap OMS masih positif, ditunjukkan dengan semakin banyaknya kerjasama antara pemerintah dan OMS baik di tingkat nasional maupun daerah. Inisiatif seperti Ormas Expo yang dikelola pemerintah, bagaimanapun juga, membantu memberi legitimasi kinerja OMS dan organisasi masyarakat yang menyediakan layanan publik. Pengakuan pemerintah terhadap OMS terlihat dari pemilihan tema Expo Ormas 2021 secara virtual yang digelar Kemendagri: Peran Ormas dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Pandemi COVID-19.

Praktik akuntabilitas OMS masih terabaikan, dan hanya sedikit OMS yang menerbitkan laporan tahunan. Beberapa OMS menjadikan masalah keamanan atau politik sebagai alasan utama mereka untuk tidak menerbitkan laporan tahunan, termasuk laporan audit keuangan.

Sebagian besar OMS memiliki kode etik, tetapi masih banyak yang gagal menginternalisasi dan menegakkannya secara konsisten. Menurut REMDEC, terdapat sejumlah tantangan utama dalam penegakannya: nilai-nilai dalam dokumen kode etik tidak cukup jelas atau dijabarkan; tidak ada prosedur penanganan pengaduan atau pemberian sanksi atas dugaan pelanggaran kode etik; dan terdapat ketidakjelasan tentang siapa yang berwenang untuk menegakkan kode etik di dalam organisasi.

***Disclaimer:*** Opini yang tertuang di sini adalah opini panelis dan para peneliti serta tidak mencerminkan pandangan USAID atau FHI 360.

Laporan CSOSI 2021 Secara Keseluruhan Dipublikasikan oleh:

**U.S. Agency for International Development**  
**1300 Pennsylvania Avenue, NW**  
**Washington, DC 20523**

Tel: (202) 712-0000

Fax: (202) 216-3524

[www.usaid.gov](http://www.usaid.gov)

Laporan CSOSI Indonesia 2021 Versi Bahasa Indonesia ini Dipublikasikan oleh:



**Konsil LSM Indonesia**

**Jl. Kalibata Utara I No. 32**

**Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740**

Email: [sekretariat@konsillsm.or.id](mailto:sekretariat@konsillsm.or.id)

Tel: +628-1624-4516

[www.konsillsm.or.id](http://www.konsillsm.or.id)





# 2021 CIVIL SOCIETY ORGANIZATION SUSTAINABILITY INDEX

INDONESIA  
NOVEMBER 2022



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**ICNL**  
INTERNATIONAL CENTER  
FOR NOT-FOR-PROFIT LAW

**fhi360**  
THE SCIENCE OF IMPROVING LIVES



# 2021 CIVIL SOCIETY ORGANIZATION SUSTAINABILITY INDEX

For Indonesia

November 2022

**Developed by:**

United States Agency for International Development

Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance

Center of Excellence on Democracy, Human Rights and Governance

**Acknowledgment:** This publication was made possible through support provided by the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. AID-OAA-LA-17-00003.

**Disclaimer:** The opinions expressed herein are those of the panelists and other project researchers and do not necessarily reflect the views of USAID or FHI 360.

# ACKNOWLEDGMENTS

A publication of this type would not be possible without the contributions of many individuals and organizations. We are especially grateful to our implementing partners, who played the critical role of facilitating the expert panel meetings and writing the country reports. We would also like to thank the many CSO representatives and experts, USAID partners, and international donors who participated in the expert panels in each country. Their knowledge, perceptions, ideas, observations, and contributions are the foundation upon which this Index is based.

# LOCAL PARTNER

## KONSIL LSM INDONESIA

Anick HT  
Lusi Herlina  
Frans Tugimin  
Sarwitri

# PROJECT MANAGERS

## FHI 360

Michael Kott  
Eka Imerlishvili  
Alex Nejadian  
William Daley

## INTERNATIONAL CENTER FOR NOT-FOR-PROFIT LAW (ICNL)

Kate Musgrave  
Jennifer Stuart

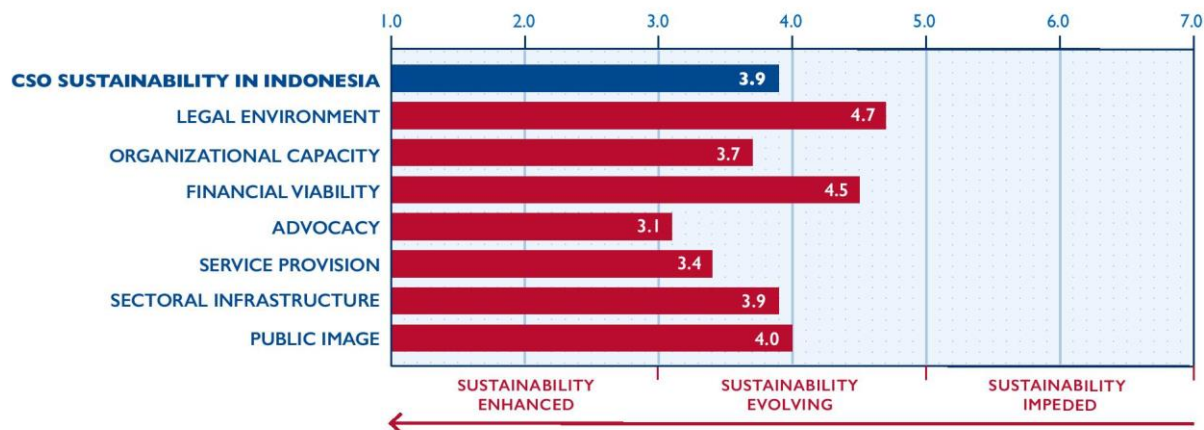
# EDITORIAL COMMITTEE

Gary Bland (USAID), Michael Chelius (USAID), Maria Covalenco-Tietz (USAID), John Tyynela (FHI360), Bishnu Sapkota (FHI360), Hans Antlov (FHI360), Natasha Dandavati (ICNL), Zac Lampell (ICNL), and Kourtney Pompei (Regional Expert)

# INDONESIA

Capital: Jakarta  
Population: 277,329,163  
GDP per capita (PPP): \$11,400  
Human Development Index: High (0.705)  
Freedom in the World: Partly Free (59/100)

## OVERALL CSO SUSTAINABILITY: 3.9



The COVID-19 pandemic continued to spur health, economic, and social crises in Indonesia in 2021 as cases soared. By mid-July, Indonesia recorded its highest number of new daily cases, registering 56,757 positive cases in just one day. By December 31, a total of 4,262,720 people had tested positive for the virus since the start of the pandemic and 144,094 had died. This marked a significant increase over the 743,198 cases and over 22,000 deaths recorded at the end of 2020.

The surge in cases beginning in July prompted a change in the government policy that had been in place since April 2020. Rather than large-scale social restrictions, the government enacted restrictions on community activities, established by the new Instruction from the Minister of Home Affairs (MOHA) No. 25/2021. From July to the end of the year, the government issued six additional Instructions, including the restriction of non-essential businesses to designated operating hours. Each province and district could adjust COVID-19 regulations based on the rise and fall of local cases. Broadly, the impact of these regulations was felt to be even more significant than those that had been in place the previous year. The changes and variations in regulations, however, caused confusion, and the regulations themselves even spurred some demonstrations over the course of the year. In February, Indonesia made COVID-19 vaccinations mandatory for citizens, and by the end of the year the government had distributed 165.2 million first doses, 113.2 million second doses, and 1.3 million third doses.

Indonesia's economy continued to suffer from the impact of the pandemic, directly affecting funding for CSOs as available resources were diverted to relief and the most urgent needs. Though the economic growth rate of 3.69 percent showed improvement over the 2.07 percent decline in 2020, unemployment remained high. According to the Central Bureau of Statistics, 21.32 million workers were affected by the pandemic in 2021, including 1.82 million who lost their jobs, nearly 1.4 million who temporarily stopped working, and 17.4 million who had their hours cut. In 2021, Penabulu Foundation reported that 33.9 percent of CSOs surveyed were affected by the pandemic—financially or otherwise—and another 27.1 percent were severely affected.

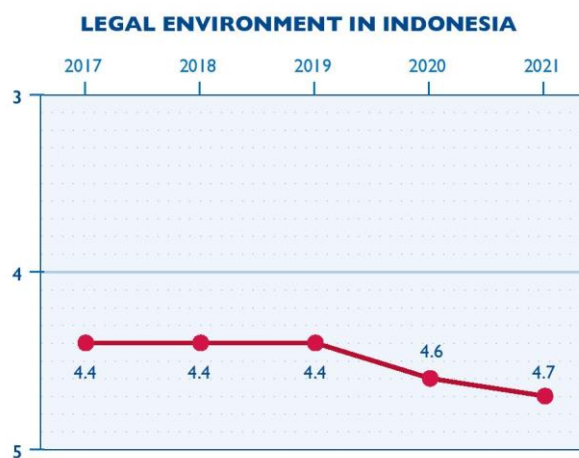
Even in this challenging environment, there were encouraging developments for democracy in Indonesia. According to both Freedom House and the Economic Intelligence Unit (EIU) Democracy Index, Indonesia recorded slight improvements in 2021. However, it is still considered “partly free” by Freedom House and a “flawed democracy” according to EIU, indicating ongoing concerns around press freedom, anti-critical political culture, weak citizen political participation, and government performance.

The national political map remained largely unchanged in 2021, dominated by the governing coalition. The coalition's hold on the political environment only increased when yet another party, the National Mandate Party (PAN), joined the government at the end of August. 2021 also marked the “political warm-up” to February 2022, when decisions around the timing and details of the 2024 elections began. A number of potential presidential candidates were already under discussion and their growing influence was evident even in 2021.

The overall sustainability of CSOs in Indonesia remained unchanged in 2021, though all dimensions but sectoral infrastructure and public image recorded slight shifts. The wider legal and financial environment for CSO operations experienced slight deterioration through a combination of bureaucratic complications, harassment, and the continuing financial impact of COVID-19. At the same time, however, CSOs proved themselves to be adaptable to the circumstances and applied lessons that had been learned in the first year of the pandemic, such as shifting to digital methods and better engaging with constituencies, the government, and each other, leading to slight improvements in organizational capacity, advocacy, and service provision.

According to the Ministry of Law and Human Rights, as of early January 2022, a total of 470,966 CSOs were registered in Indonesia. Foundations account for 275,530 of these and the remaining 195,466 are registered as associations. This marks a notable increase from the last available data, which indicated a total of 431,500 CSOs registered as of November 2019.

## LEGAL ENVIRONMENT: 4.7



The legal environment for CSOs in Indonesia slightly deteriorated in 2021, continuing a gradual downward trend. Though policies and regulations remained unchanged, CSOs continue to face bureaucratic complications and harassment, alongside growing threats to freedom of expression.

The policies governing CSO registration remained unchanged in 2021. CSOs can obtain legal status as either an association (a member-based organization) or a foundation. Foundations are regulated by the 2001 Law on Foundations, revised in 2004, while associations are governed by Staatsblad (Statute) No. 64/1870. CSO registration is further regulated by Law No. 17/2013 concerning Societal Organizations and MOHA Regulation No. 57/2017 concerning Registration and Management of

Societal Organization Information Systems. CSOs with legal status must receive approval from the Ministry of Law and Human Rights, while CSOs that do not have legal status must acquire a registration certificate (SKT) from MOHA. The requirements for receiving an SKT are relatively simple and free, but CSOs must renew their SKT every five years.

In practice, however, many CSOs in Indonesia do not have either legal status or an SKT. Some smaller CSOs at the district level are not legally incorporated simply because the process is cost prohibitive. Some CSOs also consider SKTs or legal status necessary only for cooperation with the government or national and international institutions.

In 2021, several CSOs faced obstacles in registration, including obtaining approval from the Ministry of Law and Human Rights. For instance, some notaries (all of whom are appointed and dismissed by the ministry) were not willing to process applications for legal status from CSOs working on lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) issues, and requested that reference to LGBT communities and issues be removed from the organizations' articles of association. For one such CSO, Arus Pelangi, it took nearly ten years to obtain legal entity approval, which was ultimately enabled only by its ability to find a notary willing to retain reference to LGBT communities. The Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA) also struggled to obtain legal status for its branch offices in several provinces because some of its program activities were considered the duty of state law enforcement institutions and therefore contrary to regulations on societal organizations. Those branch offices continued to operate regardless and worked through FITRA's national office if they required status as a legal entity to cooperate with other institutions.

Several CSOs working on the social reintegration of former ISIS supporters, including the Asian Muslim Action Network (AMAN) and members of the Working Group of Women for Preventing/Countering Violent Extremism, were not previously required to obtain legal status or an SKT. In 2021, however, village governments made legal status or an SKT obligatory in order to continue local operations. CSOs that did not meet these requirements

were prohibited from activities in the village. In cases such as this, increasingly stringent requirements for legal status or an SKT are perceived as an attempt to impede CSOs working on sensitive issues.

A number of CSOs that operate independent non-profit media also had problems registering with the Press Council in 2021. Because media must be incorporated as limited liability companies in order to register, associations or foundations were ineligible. This included, for instance, KONDE, which was founded by women's activists and the Nusantara Social Network News Media. Registered status in the Press Council is needed to get easy access to arbitration in the Press Council.

Freedom of expression was increasingly threatened in 2021, evidenced in the government's use of SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation) to silence and intimidate critical voices. For instance, government officials filed charges against four human rights activists in 2021: two were reported by the Coordinating Minister for Maritime Affairs for statements regarding his alleged involvement in a mining business, and the Presidential Chief of Staff reported two researchers from Indonesia Corruption Watch (ICW) over slander allegations for linking him to rent-seeking in the circulation of Ivermectin. While the researchers have not been summoned by the police, a case against the two activists is ongoing. In November, the Coordinating Minister for Maritime Affairs threatened to conduct an audit of NGOs for allegedly disseminating false information about deforestation under the current government. A coalition of NGOs, including Greenpeace and the Indonesian Forum for the Environment (WALHI), considered the threat to audit a means of discouraging criticism and published a joint statement in response. As yet, no further action has been taken.

Also in 2021, anonymous online harassment targeted ICW activists and speakers at a press conference held in response to the threatened dismissal of seventy-five employees of the Corruption Eradication Commission (KPK) who had been critical of current KPK leadership. The harassment included hacking Zoom links, displaying pornographic videos, and robocalls.

The Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) recorded sixteen cases of violence and threats against human rights defenders from January to August 2021, ranging from physical attacks and arrests to detentions, legal proceedings, and land grabbing. Though data for the full year is not yet available, trends show increasing threats and violations over the past few years, often committed by state actors. The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS) also recorded twenty-five cases against environmental rights activists accused of committing criminal acts in 2021, in addition to instances of arbitrary arrest, violence, intimidation, and other violations against human rights defenders. In those twenty-five criminal cases, a total of ninety-four people were arrested, including indigenous peoples, civilians, and community legal assistants.

CSOs continued to receive tax exemptions on income from grants, donations, and inheritance, as well as *zakat* (required Islamic giving) if the CSO is a government-approved *zakat* collector. However, the procedure for applying for such exemptions is bureaucratic and complicated. Limited income tax deductions are available for persons or entities that provide contributions to national disaster relief, research and development, educational or sports facilities, or social infrastructure development.

Associations may not engage in economic activities. Foundations may engage in economic activities by establishing business entities or investing up to 25 percent of their total wealth in enterprises; the profit from those activities is taxed. MOHA Regulation No. 30/2008 regulates the procedures for public organizations to receive assistance from foreign parties and specifies that the organization must be registered and MOHA must approve the plan for accepting foreign assistance. However, these rules are not typically fully implemented and most CSOs do not follow them, though a few donors require their grantees to receive government approval.

Legal assistance for CSOs continues to be available in state and provincial capitals but rare at the district level. The Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and the Indonesian Legal Aid Association (PBHI) have sufficient capacity at national and regional levels but only have offices in the capital city and provincial capitals.

## ORGANIZATIONAL CAPACITY: 3.7

The organizational capacity of the CSO sector continued to improve slightly in 2021 as, despite the continued difficulties of pandemic restrictions, CSOs strengthened and expanded their outreach and constituencies, particularly through the use of digital technologies. The relatively low cost of online communication enabled CSOs like Bhakti Foundation to reach more constituents at lower cost than they could when travelling to constituent locations. Networks like AMAN Indonesia also used online communication to better understand constituent needs and project impact through improved monitoring and evaluation. USAID's MADANI project further boosted CSO constituency building in 2021 through its CSO Capacity Building Program, which worked with forty-four local CSOs in thirty-two districts in six provinces. According to research by PRAKARSA and the National Research and Innovation Agency (BRIN), CSOs in those six provinces demonstrated particularly high participation rates, again largely aided by the increased use of online communication.



Similarly, across the sector, CSOs' capacity for strategic planning continued to increase. Many CSOs gave particular attention to strategic planning in 2021, recognizing that it encouraged greater funding and collaboration opportunities. According to the National Research Priority 2021 report "Measuring the Governance Index of CSOs in Strengthening Substantive Democracy in Indonesia," CSOs in Indonesia generally have clear visions and missions, which in turn inform their strategic plans.

Most CSOs have flexible internal management structures based on program needs and try to have clearly separate responsibilities for decision making, implementation, and control. The extent of board engagement varies depending on the needs and resources of the CSO. In 2021, some boards were more actively involved in determining their organization's response to the COVID-19 crisis at both the policy and practice levels, especially in smaller CSOs. Broadly, however, most boards tend not to be very engaged in organizational governance. The USAID MADANI project continued to work with its CSO partners to strengthen internal management and all forty-four now have standard operating procedures.

In 2021, many CSOs continued to implement work-from-home operations. In-person meetings were held only if necessary and adhered to strict health protocols. Some national CSOs, such as the Kapal Perempuan Institute, formalized their work-from-home rules in writing. In 2021, many CSOs also made an effort to allow greater flexibility and better engage their staff while adapting to the shifting work culture and environment.

The salaries and benefits of CSO staff vary greatly from one organization and province to the next. According to research by PRAKARSA, for instance, in North Sumatra, Greater Jakarta, Central Java, and Yogyakarta (DIY), the minimum wage (UMR) system is strictly adhered to. Some CSOs, however, did not have the financial resources to pay staff according to the system, and in South Sulawesi, only one out of eleven CSO survey respondents were able to pay staff the minimum wage established by the UMR system. Accordingly, staffing and recruitment remain particular concerns for CSOs, and because many work on a project basis, it is difficult to retain staff. Instead, some CSOs recruit volunteers to bolster their capacity. While no clear data is available, some estimate that at least 80 percent of CSOs engage volunteers in their work. According to the Charities Aid Foundation's (CAF) *World Giving Index 2021*, which reports data from 2020, Indonesia had the highest rate of volunteering among the countries studied, with 60 percent of respondents indicating that they volunteered in the previous month; much of that volunteerism, however, tends to be for religious purposes, not necessarily with CSOs.

Internet and information and communications technology (ICT) have become necessary for the vast majority of CSO operations, and CSOs continued to significantly develop their technical capacities and use of ICT in 2021. The vast majority of CSOs use websites, social media, and financial software to support their work. However, data security remains a challenge, and in 2021, there were several reports of data leaked from government offices,



companies, and CSOs. Some local CSOs, especially those in rural areas, continued to have limited access to ICT or lacked the hardware, bandwidth, and technical skills for online-based work.

## FINANCIAL VIABILITY: 4.5



The financial viability of CSOs experienced a slight deterioration in 2021 due to the ongoing economic impact of the COVID-19 pandemic and declines in domestic and foreign funding across the sector.

CSOs in Indonesia continued to benefit from a diverse range of funding sources: foreign donors (state and non-state); the Indonesian government, through direct assistance or projects; companies through corporate social responsibility (CSR) funds; the public, through fundraising or crowdfunding; and internal business, through service provision or social enterprises. A CSO's diversification of funding is typically influenced by the type of activities it operates. According to the SMERU Research Institute, those conducting research were most likely to have several sources of funding. In 2021, the

MADANI project provided technical assistance to CSOs in thirty-two districts to diversify their funding.

Overall foreign assistance has declined since 2008, when Indonesia joined the G20. The typical mode of funding has also shifted: whereas funding institutions previously provided substantial programmatic and institutional support, they now often hire just one or two individuals from the partner CSO. Still, in 2021, CSOs received substantial funding from several foreign donors. For instance, the United Nations Development Programme (UNDP) funded CSOs to implement an entrepreneurship program, including capacity building, to boost economic recovery in the country. The European Union (EU) has a budget of IDR 108.5 billion (approximately \$7.3 million) to support CSOs' efforts to tackle the health and social impacts of the COVID-19 crisis. With support from the EU, the Penabulu Foundation launched the Co-Evolve project, which will provide support to 200 local CSOs in thirty-four provinces around the country. USAID's MADANI project continued to be a significant source of support in 2021 and will allocate \$19.8 million in funding between 2019 and 2023.

To receive funds from state and regional budgets, a CSO must be a legal entity and have an SKT. In 2021, CSOs competed for government grants in accordance with MOHA Regulation No.123/2018. Because most government funds are allocated to CSOs through local governments, it is difficult to ascertain total government support. Sukoharjo Regency, for instance, distributed IDR 5 billion (\$337,300), Tulungagung Regency (East Java) IDR 1.6 billion (\$108,000), and Sambas Regency (West Kalimantan) provided a total of IDR 400 million (\$27,000) in grants to five organizations. The Bangka Belitung Provincial Government provided grants worth a total of IDR 23.5 billion (\$1.58 million) to 108 CSOs. Also in 2021, the Ministry of Law and Human Rights granted IDR 53 billion (\$3.6 million) to CSOs that provide legal aid to their constituents free of charge.

However, PRAKARSA found that government support typically covered only a portion of the total costs of CSO projects, leaving CSOs to cover the remainder. The majority of CSOs (60 percent) stated that government funds covered 25 percent or less of the projects they were intended for; 16 percent CSOs reported that they received 25 to 50 percent of project needs, and only 12 percent indicated that they receive 75 percent or more of project costs from the government.

In 2021, the government revised Presidential Regulation No. 16 of 2018 regarding the Procurement of Government Goods/Services. This made it easier for CSOs to access government funds by removing the financial audit requirement in the Type 3 self-management mechanism, one of four mechanisms for CSO cooperation with regional governments.

At the end of 2021, the Working Group for a CSO Endowment Fund—consisting of the International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indonesian NGO Council, Penabulu Foundation, the Kapal Perempuan Institute, Indonesia for Humanity (IKA), PRAKARSA, Transparency International Indonesia (TII), and Resource Management and Development Consultant (REMDEC)—submitted a draft Presidential Regulation for the creation

of a CSO Endowment Fund. This proposed regulation is intended to provide a sustainable source of funding for CSOs involved in the development and democratization process.

Funding through CSR programs remained common, and in 2021, CSR funding from the Indonesia Stock Exchange (BUI), PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), and PT Kustodia Sentral Efek Indonesia (KSEI), among others, provided donations to the Indonesian Red Cross (PMI) in the form of equipment worth IDR 10.3 billion (approximately \$700,000). The campaign #InvestasiAndaMenolongSesama continued to serve as a platform for CSR support to CSOs but has not yet reported the total amount raised in 2021.

PMI also collects public funds in accordance with Law No. 1/2018 and Government Regulation No. 7/2019; each regional government is then able to make regulations based on that law, collecting funds from the public through various mechanisms like earmarked taxes. In 2021, the PMI of Bekasi City received more than IDR 2.3 billion (\$155,000); the PMI in Pati Regency received IDR 1.9 billion, up from IDR 1.6 billion in 2020 (\$128,000 and \$108,000); the PMI in Kendal Regency received nearly IDR 1.3 billion, compared to IDR 800 million in 2020 (\$88,000 and \$54,000); and the PMI of East Jakarta City received IDR 10 billion, up from IDR 9 billion (\$673,000 and \$606,000).

According to the National Board of Zakat Republic of Indonesia (BAZNAS), charitable giving in the form of *zakat*, *infaq*, and *alms* totaled IDR 11.5 trillion in 2021 (approximately \$785 million), an increase of 20 percent compared to the IDR 9.2 trillion (\$620 million) collected in 2020. Approximately 70 percent of that came from individuals aged 25–44 years, suggesting a new trend of increased giving from the younger generation.

In 2020, eight out of ten people in the country donated money, making Indonesia the most generous country in the world, according to the *CAF World Giving Index 2021*. This largely comes in the form of *zakat*. Most CSOs are still new to the use of digital platforms for fundraising, and funds raised through online platforms like Kitabisa.com are limited.

Most CSOs, particularly those operating at the national level, are able to practice good financial management; however, smaller organizations continue to lack staff capacity and adequate hardware and software. Few CSOs regularly make their financial reports publicly available online. Out of a sample of fifteen national CSOs, just four had uploaded financial reports. The Law on Foundations requires foundations that receive donations from the state, overseas parties, or third parties totaling IDR 500 million (approximately \$34,300) or more to be audited by a public accountant and to publish their annual report summaries in an Indonesian-language daily newspaper, but some CSOs still cannot afford the fees of public accountants.

---

## ADVOCACY: 3.1

CSO advocacy slightly improved in 2021 as cooperation with the government and within the sector increased. CSOs also celebrated several successful advocacy campaigns over the course of the year.

CSOs continued to collaborate with the government at various levels. This cooperation increased in 2021 as CSOs better adapted to working in the context of COVID-19 restrictions, and was particularly notable in COVID-19 management and relief.

The LinkLSM consortium—formed in 2020 by Akatiga, Indonesia NGO Council, FITRA National Secretariat, and YASMIB Sulawesi—developed a database and platform for CSO engagement as governmental goods and services providers in 2021. This consortium also promotes best practices of CSOs that have succeeded in becoming government partners in Type 3 self-management, and in 2021, the consortium successfully advocated for the revision of Presidential Regulation No. 16 of 2018 to remove the audit requirement for CSOs engaged through that mechanism.





AMAN Indonesia continued to collaborate with the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Ministry of PPA); the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs; and the Coordinating Ministry for Human Development and Culture. Through that cooperation, AMAN Indonesia, supported by the Ministry of PPA, succeeded in encouraging the establishment of a formal regulation to implement the National Action Plan for the Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflict.

CSOs also successfully collaborated with the National Counter Terrorism Agency (BNPT) and several other ministries, and in January 2021, President Joko Widodo (Jokowi) signed Presidential Decree No. 7 of 2021 regarding the National Action Plan for Combating Extremism. The plan was drafted with input from CSOs and explicitly called for civil society's involvement in efforts to prevent extremism moving forward.

CSOs were actively involved in numerous advocacy campaigns, legal hearings, and lobbying at both national and regional levels during the year. Advocacy in opposition to the Omnibus Law on Job Creation saw some limited success in 2021: following active civil society collaboration, organization, and campaigning against the law in 2020 and 2021, several CSOs submitted a Judicial Review to the Constitutional Court, which in December 2021 declared the law "conditionally unconstitutional" due to non-alignment with the standard formulation of laws and regulations and ordered legislators to revise the law within two years. The government is prohibited from issuing new implementing regulations in the meantime. However, the law—which was passed without significant public consultation and despite widespread protests—will remain in force while it awaits revision.

In 2021, CSOs also successfully supported the passage of the Sexual Violence Prevention (PKS) Bill, which later became the Sexual Violence Crime (TPKS) Bill. Minister of Education and Culture Regulation No. 30 of 2021 further addressed the prevention of sexual violence and the protection of victims of sexual violence in education. Both efforts show progress in the issue of sexual violence but have been met with resistance from certain Islamist groups, which argue that it should also regulate against extramarital sex. The TPKS Bill was included among priority legislation for the House of Representatives and awaited final parliamentary approval at the end of 2021.

CSOs also advocated for their issues through hearings and lobbying at the local level. For example, GMBI conducted a hearing with the Deputy Regent of Maros Regency, South Sulawesi, to advocate on behalf of street vendors threatened with eviction. As a result, government authorities agreed to regulate street vendors without displacing them.

CSOs have also established strong collaboration with local governments around health issues, particularly in the six provinces that host CSOs supported by the MADANI project. Spurred by CSO advocacy, several governments at the village level have also issued formal regulations to use village funds to tackle these health issues.

Climate change and environmental issues were also key areas of CSO advocacy in 2021. The FITRA National Secretariat's work to encourage a green economy was successfully incorporated into the National Mid-term Development Plan (RPJMN), and the government then allocated a special budget for climate change issues. At the village level, the ECHO Green consortium encouraged the creation of village regulations to support a green economy, and in 2021 it provided assistance to women farmers and youth in ninety-nine villages to carry out advocacy efforts in favor of village regulations.

CSOs also continued to advocate for reforms impacting the CSO sector itself. In 2021, the Working Group for a CSO Endowment Fund was formed to encourage more government funding for CSOs. Toward that end, the consortium published studies which were then used as advocacy materials in discussions with the Ministry of National Development Planning (Bappenas) and the Office of the President.

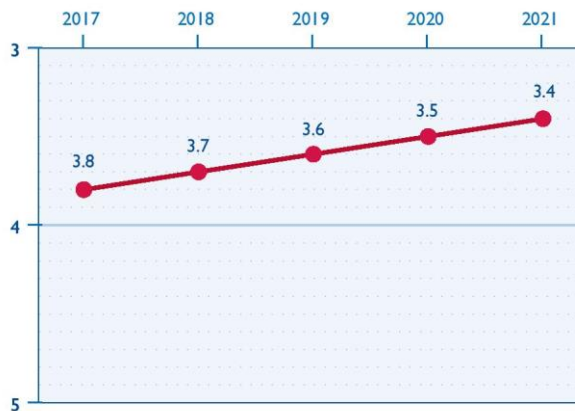
---

## **SERVICE PROVISION: 3.4**

CSO service provision slightly improved in 2021, continuing the positive trajectory of the past five years. Though the COVID-19 pandemic continued to force adaptation, in 2021, CSOs were better adjusted to the challenges of the environment. CSOs also began shifting their focus back to more traditional and long-term services, in addition to continuing to address emergency needs, and increasingly used digital technology to do so.

CSOs continued to provide traditional services in the areas of reproductive health, law, assistance to vulnerable groups, advocacy, and education. In 2021, they also continued to adapt to COVID-19 restrictions and precautions by increasing their use of digital technology, including social media for public outreach and meetings held over

### SERVICE PROVISION IN INDONESIA



online platforms like Zoom. Organizations produced more digital content and echoed the Ministry of PPA's efforts to increase digital literacy, particularly to empower women and combat online gender-based violence.

CSOs also developed new services in response to the ongoing health crisis. Several CSOs, including Indonesian Children's News Agency, Paritas Institute, Women's Participation Institute, and Indonesian Genes, initiated the #GerakanBantuKeluarga campaign to distribute aid to the orphans of COVID-19 victims. Some CSOs, such as the Indonesian Conference on Religion and Peace, continued to distribute food to COVID-19 patients in isolation.

CSOs provide services based on community needs and the issues in their particular focus areas. Given the continuing demand during the health crisis, they also continued to provide services to communities beyond their own members and traditional constituencies. They remained adept and responsive to emergency needs in 2021, as they were in 2020 with the outbreak of COVID-19. For instance, Puli Foundation, which provides counseling services for victims of sexual violence, placed special emphasis on the types of vulnerabilities that could potentially arise in the context of COVID-19 pandemic.

Most CSO services are provided free of charge. Few CSOs generate revenue through paid services, but the model is becoming more popular. For example, Insan Sembada Foundation offered consulting services for training, research, program design, and community engagement through media. The FITRA National Secretariat also developed consultative budgeting services for local governments. Several CSOs also recovered the cost of some service delivery through government procurement, often using the Type 3 self-management mechanism noted above, which created new opportunities and stimulated the diversification of services that CSOs can provide.

Government support for CSO services remained positive and CSO and government collaboration improved over the course of the year. This was also evident in the easing of the process for CSOs to access government funds, as discussed above. Generally, however, formal statements in recognition of CSO contributions are not common.

## SECTORAL INFRASTRUCTURE: 3.9

The infrastructure supporting the CSO sector in Indonesia remained largely unchanged in 2021, though several new initiatives suggest possible improvements to come.

Several organizations at the national level, including Penabulu Foundation, KEHATI Foundation, and Yappika, act as intermediary support organizations (ISOs). In 2021, Penabulu Foundation developed several new initiatives, such as the Resource-Hub for Financial Resilience, with support from the Ford Foundation. Several resource centers also continue to serve CSOs. An initiative at Trisakti University, for example, assists CSOs in developing social enterprises. Simpulmadani, initiated by Penabulu Foundation, Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC), Satudunia, and Sinergantara with support from USAID MADANI, develops learning platforms and online forums to build CSO capacities. The Learning Center for CSOs (LEARN) also offers training videos for CSOs.

In March 2021, sixty-two CSOs in thirty-four provinces launched the CSO network Lokadaya, which aims to mobilize, share, and manage domestic resources for sustainable CSO contributions to Indonesia's inclusive

### SECTORAL INFRASTRUCTURE IN INDONESIA



development. Through the Co-Evolve program, Penabulu Foundation and SKALA Foundation have also built a growing CSO resource center, and in 2021 created a special seminar series on the CSO response to COVID-19 in Indonesia.

In 2021, several CSOs sub-granted foreign funding to support local NGOs. IKA and Komnas Perempuan opened the 2021 Pundi Perempuan grant, and KEHATI Foundation called for proposals from members of Biodiversity Warriors. Penabulu Foundation issued a call for proposals for the SGP Indonesia Small Grant Program Cycle 3, with a total budget of EUR 847,170 to support biodiversity conservation.

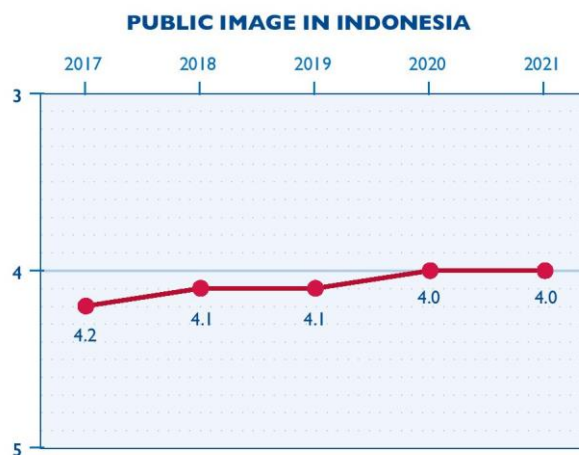
CSO coalitions grew in 2021, collaborating on various agendas. In addition to Lokadaya and Simpulmadani, AMAN Indonesia worked with forty-nine youth groups from across the country to campaign for the PKS Bill. The LinkLSM consortium also provided a database of CSOs qualified for Type 3 self-management and promoted best practices for CSOs acquiring government funding through the mechanism. Also in 2021, several CSOs formed the ADAPTASI Coalition to collaborate on issues around climate change.

Online forums are well developed, and training opportunities continued to be available both online and offline. Trainings provided by Simpulmadani, Lokadaya, Indorelawan, and others cover topics like strategic management, financial management, fundraising, advocacy, and volunteer development. However, some report that CSOs lack adequate training on constituent development and internal management. The Ministry of Education also supports capacity building for CSOs, and the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and SATUNAMA Foundation offer paid training on organizational governance.

While differences in priority areas and sectoral attitudes remain a challenge, CSOs strove to increase intersectoral cooperation in 2021. For instance, since November 2019, Habitat for Humanity Indonesia has collaborated with a global nutrition company, Herbalife Nutrition, through the Herbalife Nutrition Foundation to build healthy sanitation facilities, support health education, and combat malnutrition due to lack of sanitation facilities. In 2021, this program expanded to reach more beneficiaries, particularly in Mauk Subdistrict, Tangerang District.

CSO partnerships with government and state institutions also increased, as evidenced by the signing of numerous memorandums of understanding (MOUs). For instance, the Directorate General of Natural Resources and Ecosystem Conservation of the Ministry of Environment and Forestry signed two MOUs with the Medan Lestari Ecosystem Foundation to cooperate in conserving natural resources and their ecosystems in a sustainable manner. Daurmala signed an MOU with the Office of Religious Affairs regarding the prevention of child marriage; and the Witness and Victim Protection Agency signed an MOU with Legal Aid Ansor to strengthen witness and victim protection services. Such collaboration also existed at the local level. For example, the government of Lembata Regency (East Nusa Tenggara) began work with the Adaptation Coalition to strengthen voices for equitable climate change action.

## PUBLIC IMAGE: 4.0



The public image of CSOs remained unchanged overall in 2021.

Media coverage of CSO activities continued to increase at national and regional levels, including both television and online media. CSO activities related to COVID-19 continued to gain a substantial amount of coverage, along with some advocacy activities, especially campaigns in support of the Draft Law on the Crime of Sexual Violence and the Bill on the Protection of Domestic Workers. However, coverage was limited for activities at the grassroots level and for CSOs working on behalf of the LGBT community.

CSOs' public outreach also achieved wider recognition of their work in 2021, driven by their use of social media. In addition to WhatsApp, Facebook, and Instagram, some

CSOs also now maintain YouTube accounts and host podcasts. FITRA, for example, developed FITRA TV and a

podcast network with nodes in thirteen provinces. CSO collaboration with the media also continues to grow, and in 2021, *Tempo* collaborated with AMAN and FITRA to develop online content and ensure that CSO activities at the grassroots level received coverage.

The level of public trust in CSOs remained unchanged. According to the Edelman Trust Barometer survey released in January 2022, 68 percent of respondents indicated that they trusted NGOs, ranking lower than trust in government (70 percent) and in business (81 percent). For sources of information, respondents were again more inclined to trust the government, business, and media. Because there are still a number of “pseudo CSOs” that extort businesses and government officials, the public remains wary of the sector and is often unable to distinguish legitimate CSOs from false fronts.

The government’s perception of CSOs continues to be positive, as indicated by the increasing number of collaborations between the government and CSOs at both national and regional levels. Initiatives like the government-run Ormas Expo, however, help to highlight the work of legitimate CSOs and community organizations that provide public services. Government recognition of CSOs was evident in its chosen theme for the virtual 2021 Ormas Expo, held by MOHA: The Role of Community Organizations in National Economic Recovery and Handling the COVID-19 Pandemic.

CSO accountability practices continue to be neglected, and only a small fraction of CSOs publish annual reports. Some cite security or political concerns as their primary reason for not publishing annual reports, including financial audit reports.

Most CSOs have codes of ethics, but many still fail to internalize and consistently enforce them. According to REMDEC, there are several key challenges in enforcement: the values in codes of ethics documents are not sufficiently clear or elaborated; there is no procedure for handling complaints or imposing sanctions for alleged violations of codes of ethics; and there is a lack of clarity on who within the organization is authorized to enforce codes of ethics.

**Disclaimer:** *The opinions expressed herein are those of the panelists and other project researchers and do not necessarily reflect the views of USAID or FHI 360.*

**U.S. Agency for International Development**

1300 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20523

Tel: (202) 712-0000

Fax: (202) 216-3524

[www.usaid.gov](http://www.usaid.gov)

